

**PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS
DANA DESA (STUDI KASUS PEMERINTAH
DESA DI KECAMATAN PERBAUNGAN)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

NAMA : MUHAMMAD RIZKY ANANDA FAKHRI
NPM : 1905170073
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : MUHAMMAD RIZKY ANANDA FAKHRI
N P M : 1905170073
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS DANA DESA (STUDI KASUS PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN PEBAUNGAN)

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

IRFAN, S.E., M.M., Ph.D

Penguji II

DIAN YUSTRIAWAN, S.E., M.Si

Pembimbing

Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA., QIA

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

NAMA LENGKAP : MUHAMMAD RIZKY ANANDA FAKHRI
NPM : 1905170073
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
AKUNTABILITAS DANA DESA (STUDI KASUS
PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN PERBAUNGAN)

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2023

Pembimbing Skripsi

(Dr. WIDIA ASTUTY.,S.E.,M.Si.,Ak.CA.,CPA.,QIA)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

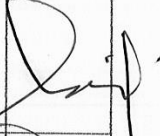


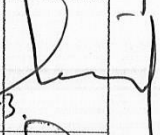
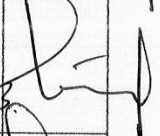
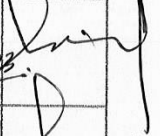
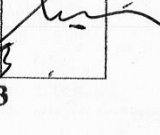
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E.,M.Si) (Assoc. Prof. Dr. H. JANURI,S.E., M.M., M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

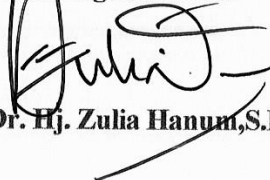
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : MUHAMMAD RIZKY ANANDA FAKHRI
NPM : 1905170073
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS DANA DESA (STUDI KASUS PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN PERBAUNGAN)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf
BAB 1	latar belakang masalah & pertanyaan keamb	21/6-2023	
BAB 2	tambahkan teori pendukung	21/6-2023	
BAB 3	Perjelas keamb definisi operasional Unibel	14/7-2023	
BAB 4	Revisi keamb & pertanyaan keamb, tambahkan literatur yang relevan	18/7-2023	
BAB 5	Perbaiki saran penelitian	22/7-2023	
Daftar Pustaka	Tambahkan literatur terbaru	24/7-2023	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Sisihkan & lanjutkan ke sub skripsi	27/7-2023	

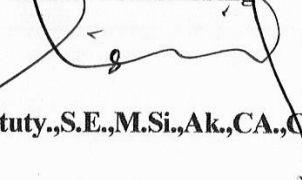
Medan, Agustus 2023

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi



Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing



Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA., QIA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizky Ananda Fakhri
NPM : 1905170073
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA
DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP AKUNTABILITAS DANA DESA
(STUDI KASUS PEMERINTAH DESA DI
KECAMATAN PERBAUNGAN)**

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Instansi tersebut

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD RIZKY ANANDA FAKHRI

ABSTRAK

PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS DANA DESA (STUDI KASUS PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN PERBAUNGAN)

**MUHAMMAD RIZKY ANANDA FAKHRI
NPM 1905170073**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238
Email : muhammadrizkyanandaf12@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Dana Desa. Untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Dana Desa. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Dana Desa pada Studi Kasus Pemerintah Desa Di Kecamatan Perbaungan. Didalam penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif untuk mengetahui hubungan setiap variabel. Data yang disajikan dalam bentuk data kuantitatif yakni menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka dan kemudian menarik kesimpulan dan pengujian tersebut. Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah perangkat desa Di Kecamatan Perbaungan dengan populasi sebanyak 72 orang dan sampel sebanyak 72 orang dengan penarikan sampel menggunakan sampling jenuh. Hasil penelitian ini adalah Kompetensi Pemerintah Desa berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Dana Desa. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Dana Desa. Dan Kompetensi Pemerintah Desa dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Dana Desa pada Studi Kasus Pemerintah Desa Di Kecamatan Perbaungan.

Kata Kunci : Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Dana Desa

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF VILLAGE GOVERNMENT COMPETENCIES AND INTERNAL CONTROL SYSTEMS ON ACCOUNTABILITY VILLAGE GOVERNMENT CASE STUDY IN PERBAUNGAN DISTRICT)

**MUHAMMAD RIZKY ANANDA FAKHRI
NPM 1905170073**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238
Email : muhammadrizkyanandaf12@gmail.com

The purpose of this study was to determine and analyze the effect of Village Government Competence on Village Fund Accountability. To find out and analyze the Internal Control System for Village Fund Accountability. To find out and analyze the influence of Village Government Competence and Internal Control Systems on Village Fund Accountability in Case Studies of Village Governments in Perbaungan District. In this study using associative approach to determine the relationship of each variable. The data presented is in the form of quantitative data, namely testing and analyzing data by calculating numbers and then drawing conclusions and testing them. In this study, the objects studied were village officials in Perbaungan District with a population of 72 people and a sample of 72 people with sampling using saturated sampling. The result of this research is that Village Government Competence has a significant effect on Village Fund Accountability. The Internal Control System has a significant effect on Village Fund Accountability. And Village Government Competence and Internal Control Systems for Village Fund Accountability in Case Studies of Village Governments in Perbaungan District.

Keywords: Village Government Competence, Internal Control System and Village Fund Accountability

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan abstrak yang berjudul “**Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Studi Kasus Pemerintah Desa Di Kecamatan Perbaungan)**”

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw. yang memiliki akhlakulkarimah sebagai penuntun para umat, semoga kita dapat berpegang teguh pada ajarannya sehingga dapat menghantarkan kita syafaatnya (kemuliaan dan kebahagiaan) di dunia dan akhirat kelak.

Abstrak ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program Sistem Pengendalian Internal Strata Satu (S1) guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Manajemen, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Terkhusus dan sangat istimewa untuk orang tua penulis tercinta dan terkasih, rasa hormat yang tulus penulis ucapkan terima kasih banyak untuk Ayahanda tercinta **Pahriadi** dan Ibunda **Nurlinda** tercinta yang selalu memberikan do’a, semangat, bimbingan mendidik dan mengasuh dengan seluruh curahan kasih sayang hingga saya dapat meraih Sistem Pengendalian Internal yang layak hingga bangku perkuliahan

Dalam proses penyusunan abstrak ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sudah selayaknya segala keindahan hati

mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu. Kepada yang terhormat

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr Januri, SE,MM.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE.,M.Si** selaku WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudi Tanjung, SE, M.Si** selaku WD III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc Prof Dr. Zulia Hanum S.E, M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar, S.E, M.Si., Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Dr. Widya Astuty SE., M.Si., Ak., CA., CPA., QIA** selaku dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun abstrak
8. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Terima kasih juga saya ucapkan seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

10. Adik kandung tercinta Mahira Warisya Fakhri yang selalu memberikan doa, semangat serta nasehat kepada saya hingga dapat menyelesaikan abstrak ini dengan tuntas.
11. Kepada seseorang yang istimewa dalam hidup saya Dina Kirani terima kasih telah membantu saya menyelesaikan abstrak ini melalui do'a, cinta dan kasih sayang selama proses abstrak ini berlangsung.
12. Kepada para sahabat-sahabat penulis yaitu Tedjo, Andre Firjatullah, Luthfi D Muzaffar, Muhammad Ridho Zaky, Fikri Adrian dan Faisal Hadiano Lubis terima kasih atas segala motivasi, perhatian dalam penyusunan abstrak ini.

Dalam abstrak ini, masih banyak kekurangan baik dari segi isi, penyajian materi maupun susunan bahasa penyampaian. Hal ini disebabkan karena kemampuan, pengalaman ilmu yang dimiliki penulis masih terbatas. Diharapkan kritik dan saran yang membangun, sehingga abstrak ini dapat lebih baik lagi.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga abstrak ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Amin Ya Rabbal'alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Juli 2023
Penulis

Muhammad Rizky Ananda Fakhri
NPM 1905170073

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Batasan Masalah	10
1.4. Rumusan Masalah	10
1.5. Tujuan Penelitian	11
1.6. Manfaat Penelitian	11
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	13
2.1. Uraian Teoritis	13
2.1.1. Akuntabilitas Dana Desa	13
2.1.1.1. Pengertian Akuntabilitas Dana Desa	13
2.1.1.2. Aspek Aspek Akuntabilitas Dana Desa.....	13
2.1.1.3. Tujuan dan Manfaat Akuntabilitas Dana Desa	15
2.1.1.4. Indikator Akuntabilitas Dana Desa	16
2.1.2. Kompetensi Pemerintah Desa	17
2.1.2.1. Pengertian Kompetensi Pemerintah Desa	17
2.1.2.2. Karakteristik Kompetensi Pemerintah Desa	20
2.1.2.3. Kategori Kompetensi Pemerintah Desa	21
2.1.2.4. Indikator Kompetensi Pemerintah Desa	23
2.1.3. Sistem Pengendalian Internal	25
2.1.3.1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal	25
2.1.3.2. Komponen Sistem Pengendalian Internal	27
2.1.3.3. Tujuan dan Manfaat Pengendalian Internal	28
2.1.3.4. Indikator Sistem Pengendalian Internal	29
2.2 Penelitian Terdahulu	32
2.3 Kerangka Konseptual	34
2.3 Hipotesis	36
BAB 3 METODE PENELITIAN	37
3.1. Pendekatan Penelitian	37
3.2 Definisi Oprasional	37
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	38
3.4 Populasi dan Sampel	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data	42
3.6 Teknik Analisis Data.....	44

BAB 4 HASIL PENELITIAN	52
4.1. Hasil Penelitian.....	52
4.2. Pembahasan.....	70
BAB 5 PENUTUP.....	75
5.1. Kesimpulan	75
5.2. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Dana Desa	4
Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan Kepala Desa	8
Tabel 3.1 Variabel Penelitian.....	38
Tabel 3.2 Waktu Penelitian	39
Tabel 3.3 Populasi	40
Tabel 3.4 Skala Pengukuran	41
Tabel 3.5 Uji Validitas	43
Tabel 3.4 Uji Realibilitas	45
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden	52
Tabel 4.2 Umur Responden	53
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Responden	53
Tabel 4.4 Lama Bekerja Responden	54
Tabel 4.5 Skor Angket Untuk Variabel Akuntabilitas Dana Desa.....	55
Tabel 4.6 Skor Angket Untuk Variabel Kompetensi Pemerintah Desa	56
Tabel 4.7 Skor Angket Untuk Variabel Sistem Pengendalian Internal.....	57
Tabel 4.8 Uji Multikoleneritas	61
Tabel 4.9 Uji Autokorelasi	64
Tabel 4.10 Regresi Linear Berganda	64
Tabel 4.11 Uji Secara Parsial (Uji-t).....	67
Tabel 4.12 Uji Secara Simultan (Uji-F).....	70
Tabel 4.13 Uji Koefisien Determinasi.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4 Kerangka Konseptual	35
Gambar 3.1 Ujit.....	49
Gambar 3.2 Uji F	50
Gambar 4. 1 Uji Normalitas	60
Gambar 4. 2 Uji Heterokedinitas.....	63

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan tersebut ditempuh dengan cara memberikan kewenangan kepada setiap desa untuk mengelola dan menjalankan sistem pemerintahannya sendiri. Wewenang tersebut diberikan dari pusat kepada daerah yang biasa disebut dengan desentralisasi. Kewenangan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan dapat menata desa dengan baik. Pembangunan yang dicanangkan pemerintah melalui desa direalisasikan dengan pemberian alokasi dana desa kepada seluruh desa di Indonesia. Secara nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang besar untuk sebuah program/kebijakan yang baru.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dan juga belum adanya sistem pengawasan yang komprehensif terhadap pengelolaan dana desa, menyebabkan terdapatnya kebebasan bagi pengelola keuangan dana desa terkait kebijakan penganggaran meliputi perencanaan yang efektif dan efisiensi, pelaksanaan yang terawasi, dan

pertanggungjawaban yang dapat diandalkan sehingga berakibat banyaknya tindakan penyalahgunaan dana desa.

Penyusunan anggaran merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan. Proses tersebut harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki wewenang (pemerintah, orang tua siswa dan guru) sesuai dengan penyusunan pelaporan yang dibuat. Selain itu, masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran. Serta berkewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban, menerangkan penyusunan anggaran dan tindakan seseorang/pimpinan dalam suatu organisasi atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran yang dijalankannya (Manik et al., 2022).

Pemerintahan desa sebagai entitas pelapor yang mengelolah segala sumber kekayaan desa meliputi keuangan desa, memiliki kewajiban untuk membuat dan melaporkan laporan keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan pertanggungjawaban pemerintah desa merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah desa kepada pemangku kepentingan atas pelaksana anggaran pendapatan dan belanja desa. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa kepada publik yang harus mencerminkan keadaan desa yang sesungguhnya (Ahyaruddin & Ramadanis, 2019).

Akuntansi pemerintahan sangat perlu diterapkan oleh lembaga-lembaga publik yang merupakan tuntunan bagi lembaga publik untuk dilakukannya transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Akuntansi pemerintahan memiliki peran yang sangat vital dalam pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik (Saragih, 2017)

Akuntabilitas diharapkan mampu memperbaiki kinerja pemerintahan desa sehingga pengelolaan dana desa menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Arfiansyah, 2020).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan kemampuan menjawab dan bertanggungjawab atas konsekuensi pengelolaan keuangan desa kepada pemerintah pusat/daerah dan kepada masyarakat. Sebagaimana perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa diperlukan sumber daya manusia yang kompeten. Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada rakyat. Untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dalam sebuah pemerintahan maka banyak faktor yang dapat mempengaruhinya (Polutua et al., 2022)

Menurut (Mardiasmo, 2019) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pemberi amanah yang memiliki hak atas pertanggungjawaban tersebut. Sehingga dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan alat penilaian kinerja pemerintah. Akuntabilitas yang baik akan menuju pada tata kelola pemerintah yang baik (good governance).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan kemampuan menjawab dan bertanggungjawab atas konsekuensi pengelolaan keuangan desa kepada pemerintah pusat/daerah dan kepada masyarakat. Sebagaimana perwujudan akutabilitas pengelolaan keuangan dana desa diperlukan sumber daya manusia yang kompeten. “Memiliki pemahaman tentang penyajian laporan keuangan desa yang memuat informasi lengkap dan relevan serta ketersediaan secara langsung adalah faktor keberhasilan dalam pengeloaan dana desa (Arfiansyah, 2020)

Tabel 1.1
Rincian Dana Desa Tahun 2022
Se Kecamatan Perbaungan

No	Nama Desa	Dana Desa
1	Desa Adolina	656.040.000
2	Desa Bengkel	760.354.000
3	Desa Cinta Air	669.848.000
4	Desa Citaman Jernih	923.941.000
5	Desa Deli Muda Hilir Des	854.547.000
6	Desa Deli Muda Hulu	974.034.000
7	Desa Jambur Pulau	829.075.000

No	Nama Desa	Dana Desa
8	Desa Kesatuan	779.804.000
9	Desa Kota Galuh	1.031.364.000
10	Desa Lidah Tanah	818.630.000
11	Desa Lubuk Bayas	737.863.000
12	Desa Lubuk Cemara	673.289.000
13	Desa Lubuk Dendang	977.257.000
14	Desa Lubuk Rotan	764.705.000
15	Desa Melati I	1.320.459.000
16	Desa Pematang Sijonam	838.026.000
17	Desa Pematang Tatal	752.428.000
18	Desa Sei Buluh	886.417.000
19	Desa Sei Nagalawan	818.136.000
20	Desa Sei Sijenggi	1.006.339.000
21	Desa Suka Beras	841.102.000
22	Desa Sukajadi	876.283.000
23	Desa Tanah Merah	1.079.987.000
24	Desa Tanjung Buluh	680.751.000
TOTAL		20.550.679.000

Sumber : <https://sid.kemendes.go.id/village-fun>

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa desa se Kecamatan Perbaungan telah menerima anggaran dana desa yang berbeda-beda yang disebabkan oleh adanya perhitungan anggaran dana desa yang didasarkan pada jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Oleh karena itu, pemerintah Desa dalam mengelola dana desa tetap harus menyesuakannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu secara

efisien, ekonomis, efektif, transparan dan penuh pertanggungjawaban dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat (Nababan & Sembiring, 2021)

Dalam pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa dapat berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pengelolaan Dana Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bagaimana pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan-tahapan yang lainnya. Siklus Pengelolaan Keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Pengelolaan keuangan yang bersifat akuntabel adalah harapan dan keinginan bagi setiap organisasi pemerintahan. Pola pengelolaan keuangan inilah yang diterapkan oleh pemerintah desa, demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakatnya. Akuntabilitas dapat memberikan gambaran dari sumber daya yang telah dikelola oleh pemerintah, Akuntabilitas dapat menjadi kontrol terhadap segala aktivitas/kegiatan yang dilakukan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa, maka dari itu akuntabilitas sangat penting keberadaannya dalam pengelolaan dana desa (Utami & Rambe, 2021).

Sumber daya manusia yang kompeten akan mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Menurut (Mualifu et al., 2019) menyebutkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan turut

memengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Sehingga pentingnya kompetensi aparat pemerintah desa terkait dengan pengelola keuangan desa akan mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Sumber daya manusia yang kompeten akan mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Menurut (Cheng et al., 2008) menyebutkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan turut memengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Sehingga pentingnya kompetensi aparat pemerintah desa terkait dengan pengelola keuangan desa akan mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu, dalam pengelolaan dan desa yang baik pemerintah desa terkait harusnya mempunyai sumber daya berkualitas yang tentunya di dukung dengan latarbelakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan/seminar dan tentunya mempunyai pengalaman di bidang keuangan (Rifa'i et al., 2021)

Berkaitan dengan kondisi kompetensi aparatur desa, fenomena yang terjadi menunjukkan di beberapa pemerintahan desa desa yang ada di Kecamatan Perbaungan ini mengenai kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih terbilang sangat kurang. Kepala desa seharusnya selaku pihak yang paling bertanggungjawab dalam pengelolaan dana desa dituntut agar lebih kompeten dan akuntabel dalam mengelola dana desa (Lubis et al., 2020).

Terlebih kemampuan sebagian besar SDM yang mengelola keuangan desa menjadi hal yang perlu diperhatikan, aparatur desa yang belum sepenuhnya paham mengenai pengelolaan dana desa dikarenakan tingkat pendidikan yang tidak

sesuai menjadi salah satu faktor kompetensi aparatur desa sering mengalami kesulitan atau membuat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini didukung dari adanya data mengenai Tingkat Pendidikan Aparatur desa pada Kecamatan Perbaungan antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tingkat Pendidikan Kepala Desa
Se Kecamatan Perbaungan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SMA	16 Orang
2	Sarjana	8 Orang

Sumber : Kecamatan Perbaungan

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa adalah Sistem Pengendalian Internal. Menurut Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO) dikutip dalam (Sujarweni, 2015), pengendalian internal adalah serangkaian tindakan yang terdiri dari serangkaian proses dalam organisasi. Pengendalian internal masuk dalam proses manajemen dasar yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan.

Menurut (Harnanto, 2017), sistem pengendalian internal meliputi berbagai teknik, prosedur dan praktik yang diterapkan perusahaan untuk mendapatkan suatu sistem informasi akuntansi yang efisien juga dapat diandalkan, sehingga manajemen mendapatkan bantuan dalam hal merencanakan dan mengendalikan kegiatan usaha dan menjaga keamanan aset perusahaan. Tujuan pengendalian intern menurut (Diana & Haryati, 2021) mengatakan bahwa sistem pengendalian intern juga harus memberikan kemungkinan untuk mendeteksi sedini mungkin terjadinya pelanggaran

Secara umum, permasalahan yang terjadi dikarenakan kelemahan sistem pengendalian intern banyak ditemukan dalam pengelolaan akun Pendapatan dan Belanja. Atas berbagai kelemahan tersebut, maka untuk mencapai kualitas laporan keuangan negara/daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Pengendalian Intern pada pemerintah pusat dan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 juga menjelaskan bahwa unsur sistem pengendalian intern pemerintah ada 5 yaitu Lingkungan pengendalian, Penilaian resiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan pengendalian intern. Melalui penguatan SPIP, diharapkan upaya perbaikan kualitas penyusunan laporan keuangan dapat lebih dipacu sehingga laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah dapat memperoleh opini yang semakin baik. Sebab dengan meningkatnya opini yang diberikan BPK atas suatu laporan keuangan, berarti laporan tersebut dapat dipercaya sebagai alat pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan (stakeholders).

Selain itu, SPIP yang baik dapat mencegah pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara (BPK, 2014). Saat ini dana desa akan langsung diperiksa oleh BPK bukan Inspektorat lagi. Jadi, sangat penting untuk Kantor Desa di Kecamatan Sei Suka untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terutama masih ada yang belum menerapkan peraturan pemerintah ini.

Faktor kompetensi, dan sistem pengendalian yang telah diuraikan sebelumnya diduga dapat memengaruhi tingkat akuntabilitas alokasi dana desa (ADD) Pemerintah Desa. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh seseorang dalam hal aparatur pemerintah, sistem pengendalian dari pihak internal yaitu inspektorat yang semakin tinggi maka dapat meningkatkan akuntabilitas Pemerintah desa terhadap publik. Level ini dapat dikategorikan sebagai bagian accounting infrastructure, accounting culture, dan accounting practice berdasarkan accountability framework (Widyatama et al., 2017)

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Studi Pemerintah Desa Di Kecamatan Perbaungan)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diperoleh informasi tentang permasalahan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas yang belum transparan yang diterapkan desa se Kecamatan Perbaungan dalam menyampaikan ke seluruh warga desa
2. Masih rendahnya kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa di Kecamatan Perbaungan.
3. Penerapan sistem pengendalian intern dan penyelenggaraan yang tidak terbuka untuk publik dan belum menerapkan SPIP
4. Masih banyak kesalahan dalam mengelola dana desa pada pemerintahan desa

1.3 Batasan Masalah

Banyak faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. Namun untuk menghindari pembahasan yang melebar, maka penulis membatasi penelitian ini dengan hanya meliputi variabel kompetensi pemerintah desa dan sistem pengendalian internal.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh pemerintah desa terhadap akuntabilitas dana desa (Studi Pemerintah Desa Di Kecamatan Perbaungan) ?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa (Studi Pemerintah Desa Di Kecamatan Perbaungan) ?
3. Apakah kompetensi pemerintah desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa (Studi Pemerintah Desa Di Kecamatan Perbaungan) ?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi pemerintah desa terhadap akuntabilitas dana desa (Studi Pemerintah Desa Di Kecamatan Perbaungan).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas dana desa (Studi Pemerintah Desa Di Kecamatan Perbaungan).

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi pemerintah desa dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas dana desa (Studi Pemerintah Desa Di Kecamatan Perbaungan).

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Dapat menambah teori atau wawasan pengaruh kompetensi pemerintah desa dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas dana desa (Studi Pemerintah Desa Di Kecamatan Perbaungan)
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh kompetensi pemerintah desa dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas dana desa (Studi Pemerintah Desa Di Kecamatan Perbaungan).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti Penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, sehingga dapat lebih memahami teori-teori yang selama ini dipelajari dibandingkan dengan kondisi yang sesungguhnya di lapangan.
- b. Bagi Perusahaan Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan pertimbangan yang bermanfaat bagi instansi terkait untuk lebih mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi

pemerintah desa dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas dana desa (Studi Pemerintah Desa Di Kecamatan Perbaungan).

.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntabilitas Dana Desa

2.1.1.1 Pengertian Akuntabilitas Dana Desa

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik.

Dana desa (DD) adalah pendapatan keuangan desa yang di anggarkan oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan sumber daya yg ada di desa. Adapun hal tersebut tertuang didalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 yang menjelaskan tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang menunjukkan bahwa desa mendapatkan prioritas pembangunan nasional, dimana tujuan undang-undang tersebut untuk meningkatkan kemandirian desa dan masyarakat melalui program-program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat khususnya yang ada di desa. Sehingga, pertanggungjawaban pengelolaan dana desa harus dapat mencerminkan pelaksanaannya di desa.

Menurut (Sadjiarto, 2020) menyatakan “Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk

mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (control) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya”.

Menurut (Mardiasmo, 2019) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut (Astuty, 2016), Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas laporan penggunaan dana desa sebagai alat evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat atas kinerja pemerintah desa untuk pengolahan dana desa.

2.1.1.2 Aspek Aspek Akuntabilitas Dana Desa

Menurut (Sari & Viranda, 2021) akuntabilitas dapat dibedakan atas :

1. Profesional accountability

Dalam akuntabilitas professional, pada umumnya para pakar professional dan teknokrat akan melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan norma-norma dan standar profesinya untuk menentukan kepentingan masyarakat.

2. Democratic accountability

Dalam akuntansi demokratis merupakan gabungan antara administrative dan politic accountability yang berarti pemerintah yang akuntabel atas kinerja dan semua kegiatannya kepada pemimpin politik. Pada negara negara demokratis, menteri pada parlemen, penyelenggaraan pelayanan publik yang akuntabel pada pimpinan masing-masing.

3. Legal accountability

Dalam katagori akuntabilitas legal (hukum), pelaksanaan ketentuan hukum disesuaikan dengan kepentingan public goods dan public service yang merupakan tuntutan masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas hukum, setiap petugas pelayanan publik dapat diajukan ke pengadilan apabila bersalah dan dan gagal dalam melaksanakan tugasnya yang sebagaimana diharapkan oleh masyarakat.

2.1.1.3 Tujuan dan Manfaat Akuntabilitas Dana Desa

Berdasarkan karakteristik Good Governance menurut (Mardiasmo, 2019) terdapat 9 (Sembilan) karakteristik diantaranya :

1. Participations
2. Rule Of Law
3. Transparency
4. Consensus Orientation
5. Equity
6. Effeciency
7. Effectiveness
8. Accountability

9. Strategic Vision

Sementara menurut (Moenek & Suwanda, 2019) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SKIP) untuk mendorong terciptanya akuntabilitas public, beberapa tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan instansi atau lembaga pemerintahan yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisiensi, dan responsif pada aspirasi masyarakat dan lingkungan.
2. Terwujudnya pemerintahan yang tansparansi.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terciptanya Kepercayaan masyarakat pada pemerintahannya

2.1.1.4 Indikator Akuntabilitas Dana Desa

Menurut (Mardiasmo, 2019) terdapat 4 (empat) unsur akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Yaitu akuntabilitas kejujuran yang terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power) yang di miliki, sedangkan akuntabilitas hokum adalah adanya kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sumber dana public.

2. Akuntabilitas Proses,

Yaitu berkaitan dengan prosedur yang mudah dan cepat untuk dipahami dalam melaksanakan tugas dalam hal sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas Program

Yaitu pertimbangan mengenai tujuan apakah dapat dicapai atau tidak, dan memperhatikan tujuan alternative lainnya yang dapat menghasilkan hasil yang lebih optimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Yaitu pertanggungjawaban kepada pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

2.2.1 Kompetensi Pemerintah Desa

2.2.1.1 Pengertian Kompetensi Pemerintah Desa

Setiap organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu dan apabila tercapai, barulah dapat disebut sebagai sebuah keberhasilan. Untuk mencapai keberhasilan, diperlukan landasan yang kuat berupa kompetensi kepemimpinan, kompetensi pekerja, dan budaya organisasi yang mampu memperkuat dan memaksimalkan kompetensi. Kompetensi pegawai adalah suatu untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Keterampilan atau kemampuan yang diperlukan pegawai yang ditunjukkan oleh kemampuan dengan konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan.

Kompetensi adalah terminologi yang sering didengar dan diucapkan banyak orang. Kita pun sering mendengar atau bahkan mengucapkan terminologi itu dalam berbagai penggunaan, khususnya terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Ada yang menginterpretasikan kompetensi sepadan dengan kemampuan atau kecakapan, ada lagi yang mengartikan sepadan dengan

keterampilan, pengetahuan dan berpendidikan tinggi. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan beberapa pengertian tentang kompetensi.

Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Habiburrahman & Zhavira, 2021)

Menurut (Wibowo, 2020) kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut.

Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk di antaranya kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati. Kompetensi juga menunjukkan karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu yang memampukan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan meningkatkan standar kualitas profesionalisme dalam pekerjaan mereka (Sedarmayanti, 2018).

Kompetensi menjelaskan apa yang dilakukan orang di tempat kerja pada berbagai tingkatan dan memperinci standar masing-masing tingkatan, mengidentifikasi karakteristik, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh individu yang memungkinkan menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif sehingga mencapai standar kualitas profesional dalam bekerja dan mencakup semua aspek catatan manajemen kinerja, keterampilan dan pengetahuan tertentu, sikap, komunikasi, aplikasi dan pengembangan (Wibowo, 2020) .

Menurut (Sedarmayanti, 2018) kompetensi adalah kemampuan melaksanakan atau melakukan pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan, didukung sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut.

Menjalankan suatu aktivitas dalam organisasi tentunya tidak mudah tanpa adanya keterampilan dalam diri setiap individu tersebut untuk menghasilkan pekerjaan sesuai dengan tuntutan. Maka dari itu semakin jelas bahwa kemampuan yang dimiliki seseorang sangat berpengaruh terhadap apa yang dikerjakannya (Wibowo, 2020).

Menurut (Sutrisno, 2019) berpendapat bahwa kompetensi menjelaskan apa yang dilakukan orang di tempat kerja pada berbagai tingkatan dan memperinci standar masing-masing tingkatan, karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh individual yang memungkinkan menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif sehingga mencapai standar kualitas profesional

dalam bekerja, dan mencakup semua aspek catatan, manajemen kinerja, keterampilan dan pengetahuan tertentu, sikap, komunikasi, aplikasi, dan pengembangan.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

2.2.1.2 Karakteristik Kompetensi Pemerintah Desa

Terdapat lima karakteristik kompetensi, yaitu sebagai berikut (Sutrisno, 2019) :

1. Motif adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan orang yang menyebabkan tindakan.
2. Sifat adalah karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi atau informasi. Kecepatan reaksi dan ketajaman mata merupakan ciri fisik kompetensi seorang pilot tempur.
3. Konsep diri sendiri adalah sikap, nilai-nilai, atau citra diri seseorang. Percaya diri merupakan keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif dalam hampir setiap situasi adalah bagian dari konsep diri orang.
4. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik. Pengetahuan adalah kompetensi yang kompleks. Skor pada tes pengetahuan sering gagal memprediksi prestasi kerja karena gagal mengukur pengetahuan dan keterampilan dengan cara yang sebenarnya dipergunakan dalam pekerjaan.

5. Keterampilan adalah kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu. Kompetensi mental atau keterampilan kognitif termasuk berpikir analitis dan konseptual.

2.2.1.3 Kategori Kompetensi Pemerintah Desa

Menurut (Wibowo, 2020) memberikan lima kategori kompetensi yang terdiri dari :

- a. Task achievement merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan kinerja baik. Kompetensi yang berkaitan dengan task achievement ditunjukkan oleh orientasi pada hasil, mengelola kinerja, memengaruhi, inisiatif, inovasi dan keahlian teknis.
- b. Relationship merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan komunikasi dan bekerja baik dengan orang lain dan memuaskan kebutuhannya. Kompetensi yang berhubungan dengan relationship meliputi kerjasama, orientasi pada pelayanan, kepedulian antar pribadi, penyelesaian konflik..
- c. Personal attribute merupakan kompetensi instrinsik individu dan menghubungkan bagaimana orang berpikir, merasa, belajar, dan berkembang. Personal attribute merupakan kompetensi yang meliputi: integritas dan kejujuran, pengembangan diri, ketegasan, kualitas keputusan, berpikir analitis, dan berpikir konseptual.
- d. Managerial merupakan kompetensi yang secara spesifik berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan, dan mengembangkan orang lain. Kompetensi manajerial berupa: memotivasi, memberdayakan, dan mengembangkan orang lain.

- e. Leadership merupakan kompetensi yang berhubungan dengan memimpin organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi, dan tujuan organisasi. Kompetensi berkenaan dengan leadership meliputi kepemimpinan visioner, berpikir strategis, membangun komitmen organisasional.

Menurut (Dessler, 2015) menyatakan pentingnya kompetensi karyawan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara berpikir sebab-akibat yang kritis

Hubungan strategis antara sumber daya manusia dan kinerja perusahaan adalah peta strategis yang menjelaskan proses implementasi strategis perusahaan. Dan ingatlah bahwa peta strategi ini merupakan kumpulan hipotesis mengenai hal apa yang menciptakan nilai (value) dalam perusahaan.

2. Memahami prinsip pengukuran yang baik

Pondasi dasar kompetensi manajemen manapun sangat bergantung pada pengukuran yang baik. Khususnya, pengukuran harus menjelaskan dengan benar konstruksi tersebut.

3. Memastikan hubungan sebab-akibat (causal)

Berpikir secara kausal dan memahami prinsip pengukuran membantu dalam memperkirakan hubungan kausal antara sumber daya manusia dan kinerja perusahaan. Dalam praktiknya, estimasi tersebut dapat berkisar dari asumsi judgemental hingga kuantitatif. Tugas yang paling penting adalah untuk merealisasikan bahwa estimasi tersebut adalah mungkin dan mengkalkulasikannya sebagai suatu kesempatan yang muncul.

4. Mengkomunikasikan hasil kerja strategis sumber daya manusia pada atasan.

Untuk mengatur kinerja strategis sumber daya manusia, harus mampu mengkomunikasikan pemahaman mengenai dampak strategis sumber daya manusia pada atasan.

2.2.1.4 Indikator Kompetensi Pemerintah Desa

Indikator Kompetensi Pemerintah Desa menurut (Puspa & Prasetyo, 2020) yaitu :

1. Pengetahuan (knowledge)

Kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya seorang karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada dengan efektif dan efisien di perusahaan.

2. Pemahaman (understanding)

Kedalam kognitif dan afektif yang dimiliki individu. Misalnya seorang karyawan dalam melaksanakan pembelajaran harus mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi secara efektif dan efisien.

3. Kemampuan/Keterampilan (skill)

Sesuatu yang dimiliki oleh individu yang melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya, kemampuan karyawan dalam memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien.

4. Nilai (value) Suatu standar perilaku yang telah ditakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, standar perilaku

para karyawan dalam melaksanakan tugas (kejujuran, keterbukaan, demokratis dan lain-lain).

5. Sikap (attitude) Perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya, reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji dan sebagainya.
6. Minat (interest) Kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya, melakukan sesuatu aktivitas tugas.

Menurut (Suparyadi, 2015) terdapat 3 (tiga) komponen utama pembentukan kompetensi, yaitu : Knowledge, Skill dan Attitude.

1. Pengetahuan (knowledge), adalah kemampuan yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai bidang yang digelutinya. Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang akan mendukung suatu pekerjaan dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik
2. Keterampilan (skill), merupakan suatu kelebihan yang dimiliki oleh seseorang dalam upaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal, misalnya seseorang yang memiliki keterampilan menggunakan sistem informasi keuangan secara komputerisasi. Selain pengetahuan dan keterampilan, hal yang perlu diperhatikan adalah sikap (attitude).
3. Sikap (attitude), merupakan pola tingkah laku seorang pegawai di dalam organisasi. Sikap yang bersifat mendukung daripada tujuan organisasi akan berpengaruh terhadap tugas yang diberikan untuk dijalankan dengan

sebaik-baiknya dan mampu bekerja sama dengan memahami motivasi orang lain, baik secara individu maupun kelompok.

Sumber daya manusia dapat tetap bertahan karena mereka memiliki kompetensi manajerial, yaitu kemampuan untuk merumuskan visi dan strategi perusahaan serta kemampuan untuk memperoleh dan mengarahkan sumber daya lain dalam rangka mewujudkan visi dan menerapkan strategi perusahaan (Sutrisno, 2019)

2.1.3. Sistem Pengendalian Internal

2.1.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal. Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission* (COSO) dikutip dalam (Sujarweni, 2015), pengendalian internal adalah serangkaian tindakan yang terdiri dari serangkaian proses dalam organisasi. Pengendalian internal masuk dalam proses manajemen dasar yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Menurut (Harnanto, 2017), sistem pengendalian internal meliputi berbagai teknik, prosedur dan praktik yang diterapkan perusahaan untuk mendapatkan suatu sistem informasi akuntansi yang efisien juga dapat diandalkan, sehingga manajemen mendapatkan bantuan dalam hal merencanakan dan mengendalikan kegiatan usaha dan menjaga keamanan aset perusahaan.

Menurut (Rokhlinasari & Hidayat, 2016) Pengendalian Internal adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personal lain dalam organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait pencapaian tujuan.

Sedangkan menurut (Hery, 2017) pengendalian internal ialah merupakan seperangkat kebijakan serta prosedur dalam melindungi aset/kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, serta menjamin tersedianya akan informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta untuk memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/Undang-Undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Pengendalian internal dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional maupun financial perusahaan telah berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen.

Menurut OJK, pengendalian internal merupakan sistem yang dirancang oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengamankan harta, menjaga ketelitian data perakunan, menegakkan disiplin, dan meningkatkan ketaatan karyawan terhadap kebijakan perusahaan.

Pengendalian intern diterapkan untuk mencapai tujuan dan meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi diluar rencana, pengendalian intern juga meningkatkan efisiensi, mencegah timbulnya kerugian atas aktiva, mempertinggi tingkat keandalan data dalam laporan keuangan dan mendorong dipatuhinya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Jadi pada dasarnya pengendalian intern merupakan tindakan yang bersifat aktif, karena mencari tindakan perbaikan apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari apa yang ditetapkan.

Berdasarkan pengertian Pengendalian Internal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Internal adalah sebuah kegiatan berdasarkan rencana organisasi yang dipengaruhi oleh dewan direktur, manajemen, dan anggota lain dalam sebuah entitas yang bertujuan untuk memberikan dorongan

kepada karyawan guna mencapai tujuan atau strategi perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.3.2. Komponen Sistem Pengendalian Internal

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commision* dikutip dalam (Butler et al., 2020), kerangka kerja pengendalian internal berfokus pada lima komponen yang terpadu yaitu:

1. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menggambarkan serangkaian standar, proses dan struktur yang memberikan dasar untuk melakukan pengendalian internal di seluruh organisasi.
2. Penilaian risiko. Penilaian risiko bertujuan membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko akan dikelola. Penilaian risiko membutuhkan manajemen untuk mempertimbangkan dampak dari kemungkinan perubahan di lingkungan internal dan eksternal dalam mengambil tindakan untuk mengelola dampak tersebut.
3. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah tindakan (umumnya dijelaskan dalam kebijakan, prosedur dan standar) yang membantu manajemen meminimalkan risiko untuk memastikan pencapaian tujuan. Aktivitas pengendalian dapat bersifat preventif dan detektif serta dapat dilakukan disemua tingkatan organisasi.
4. Informasi dan komunikasi. Informasi diperoleh atau dihasilkan oleh manajemen dari sumber internal dan eksternal untuk mendukung komponen pengendalian internal. Komunikasi berdasarkan sumber internal dan eksternal digunakan untuk menyebarkan informasi penting di

dalam ataupun di luar organisasi, sebagaimana diperlukan untuk merespon dan mendukung tujuan organisasi.

5. Kegiatan pemantauan. Kegiatan pemantauan merupakan evaluasi berkala atau berkelanjutan untuk memastikan bahwa masing-masing dari 5 (lima) komponen pengendalian internal termasuk pengendalian yang memengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen telah berfungsi.

2.1.3.3. Tujuan dan Manfaat Sistem Pengendalian Internal

Suatu pengendalian yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan, karena dengan adanya sistem pengendalian internal diharapkan semua yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Tujuan dari pengendalian internal menurut (Mulyadi, 2014) yaitu:

1. Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi.
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
3. Mendorong efisiensi kerja atau operasional perusahaan.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut (Hermawan, 2019) tujuan sistem pengendalian internal ialah memberikan jaminan bahwa:

1. Aktiva dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
3. Karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan.

Menurut (Sujarweni & Wiratna, 2017) tujuan perusahaan membuat sistem pengendalian internal adalah:

1. Untuk menjaga kekayaan organisasi
2. Untuk menjaga kelancaran operasi perusahaan

3. Untuk menjaga kedisiplinan dipatuhinya kebijakan manajemen
4. Untuk menjaga ketepatan laporan keuangan perusahaan
5. Semua lapisan dalam perusahaan tunduk pada aturan dan hukum yang telah ditetapkan perusahaan.

Untuk mencapai kegunaan dan tujuan pengendalian internal diatas maka diperlukan adanya sistem informasi akuntansi yang benar.

Hal ini dapat memberikan bantuan terhadap kekayaan yang dimiliki perusahaan sehingga dapat mendeteksi kesalahan kecil yang dapat ditimbulkan atas kebijakan – kebijakan baru yang telah ditetapkan. Apabila struktur pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka akan timbul kesalahan, ketidakakuratan, serta kerugian yang cukup besar bagi perusahaan.

2.1.3.4. Indikator Sistem Pengendalian Internal

Menurut (Elder et al., 2021) bahwa indikator sistem pengendalian internal adalah:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan Pengendalian Lingkungan pengendalian mencakup standar, proses, dan struktur yang menjadi landasan terselenggaranya pengendalian internal di dalam organisasi secara menyeluruh. Lingkungan pengendalian tercermin dari suasana dan kesan yang diciptakan dewan komisaris dan manajemen puncak mengenai pentingnya pengendalian internal dan standar perilaku yang diharapkan.

2. Penaksiran risiko

Penilaian risiko adalah proses dinamis dan berulang (iteratif) untuk mengenali (identifikasi) dan menilai (analisis) risiko atas pencapaian tujuan.

Risiko yang teridentifikasi selanjutnya dibandingkan dengan tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas-aktivitas pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui satu set kebijakan dan prosedur (misalnya prosedur operasi standar atau SOP) untuk membantu memastikan dilaksanakannya arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan.

4. Informasi dan komunikasi

Entitas memerlukan informasi demi terselenggaranya tanggung jawab pengendalian internal yang mendukung pencapaian tujuan. Manajemen harus memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Komunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam kerangka pengendalian internal COSO adalah proses iteratif dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi. Komunikasi internal harus menjadi sarana diseminasi informasi di dalam organisasi, baik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun lintas fungsi.

5. Pemantauan

Entitas memerlukan informasi demi terselenggaranya tanggung jawab pengendalian internal yang mendukung pencapaian tujuan. Manajemen harus memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya berfungsi

sebagaimana mestinya. Komunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam kerangka pengendalian internal COSO adalah proses iteratif dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi. Komunikasi internal harus menjadi sarana diseminasi informasi di dalam organisasi, baik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun lintas fungsi.

Selanjutnya menurut (Mulyadi, 2014) bahwa indikator sistem pengendalian internal adalah:

1. Struktur organisasi

Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Struktur organisasi merupakan rerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan.

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.

3. Praktik yang sehat.

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang sangat penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur,

unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Aziiz & Prastiti, 2019)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa	Kopetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi dan SPIP berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. implikasi praktis hasil penelitian ini bagi aparat pemerintahan adalah untuk meningkatkan kompetensi aparat desa melalui pelatihan SISKEUDES dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Secara teoritis, akuntabilitas keuangan sector public dapat pula dijelaskan melalui teori kepatuhan dan konsep etika.
2	(Widyatama et al., 2017)	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	Variable kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan ADD, sedangkan variable sistem pengendalian internal memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan ADD
3	(Devi et al., 2020)	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	Sistem penegendalian internal belum baik dan belum dijalankan secara efektif dan efisien sehingga menyebabkan kurangnya akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola ADD. Sistem pengendalian internal diharapkan mampu memperbaiki kualitas penyusunan administrasi pengelolaan dana desa sehingga

			dapat menghindari keterlambatan pencairan dan desa periode berikutnya
4	(Suharti & Rumsari, 2021)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Terhadap Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Desa	Sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur desa berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap akuntabilitas pemerintah desa
5	(Puspa & Prasetyo, 2020)	Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Dengan diimplementasikannya UU No 14 tentang desa, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi isu yang penting. Hal itu mengingat alokasi dana desa yang dikucurkan pemerintah nilainya terbilang cukup besar. Literatur penelitian akuntabilitas dana desa, beberapa variabel yang diduga mempengaruhi akuntabilitas meliputi aksesibilitas, kompetensi, sistem pengendalian internal, penyajian laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan.
6	(Oktavia et al., 2021)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add)(Studi Kasus Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Tanah Kampung)	Kompetensi Aparatur Desa Dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add)(Studi Kasus Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Tanah Kampung)

2.3. Kerangka Konseptual

2.3.1. Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Dalam rangka mewujudkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) maka pemerintah diharapkan melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, salah satunya dengan penerapan akuntansi sektor publik yang lebih efektif (E. N. Sari, 2014)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nurdin & Wijaya, 2019), (Indraswari & Rahayu, 2021) dan (Puspa & Prasetyo, 2020) menyatakan bahwa kompetensi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

2.3.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Pentingnya sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas dimana sistem pengendalian intern merupakan faktor yang penting dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa, berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2008 dimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan untuk memberi keyakinan yang memadai tentang ; kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan.

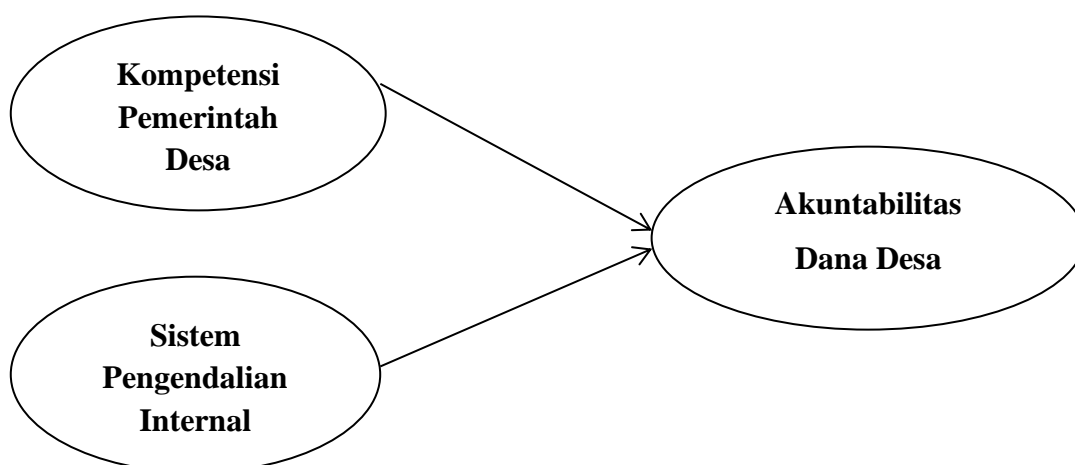
Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mualifu et al., 2019), (Widyatama et al., 2017), (Atiningsih, 2019) dan (Maharani & Akbar, 2020) menyebutkan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa.

2.3.3. Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Laporan pertanggungjawaban adalah bentuk akuntabilitas pemerintahan desa kepada pemangku kepentingan Selain pemerintah pusat, masyarakat juga memerlukan laporan keuangan untuk mengetahui sejauhmana realisasi anggaran dan pelaksanaannya. Sehingga dapat dilihat bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik menunjukkan sistem pemerintahan yang baik pula.(Sadjiarto, 2020)

Penerapan Faktor Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terbagi 3 tahap yakni Accountability Infrastructure, tahapan dimana struktur untuk mendukung sistem akuntansi disuatu organisasi harus kuat. Accounting Practice, tahapan dimana sistem akuntansi harus bekerja seperti seharusnya. Dan Accounting Culture, tahapan yang berkaitan dengan budaya yang terjadi disuatu organisasi. (Widyatama et al., 2017)

Kerangka konseptual pada penelitian ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang masih harus diuji. Oleh karena itu hipotesis berfungsi sebagai cara untuk menguji kebenaran (Suryani & Hendrayani, 2015)

4. Kompetensi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa (Studi Kasus Pemerintah Desa Di Kecamatan Perbaungan).
5. Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa (Studi Kasus Pemerintah Desa Di Kecamatan Perbaungan).
6. Kompetensi pemerintah desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa (Studi Kasus Pemerintah Desa Di Kecamatan Perbaungan) .

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Penelitian asosiatif menurut (Sugiyono, 2019) adalah “ penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih”.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dari suatu penelitian yang menjadi definisi operasional adalah:

Dalam penelitian ini penulis meneliti menggunakan Variabel dependen yakni Akuntabilitas Dana Desa sebagai (Y) dan variabel independen, yaitu Kompetensi Pemerintah Desa sebagai (X_1) dan Sistem Pengendalian Internal sebagai (X_2).

Tabel 3.1.
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional Penelitian	Indikator	Skala Pengukuran
Kompetensi Pemerintah Desa (X₁)	Menurut (Sedarmayanti, 2018) kompetensi adalah kemampuan melaksanakan atau melakukan pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan, didukung sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut (Sedarmayanti, 2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan (knowledge) 2. Pemahaman (understanding) 3. Kemampuan/Keterampilan (skill) 4. Nilai (value) 5. Sikap (attitude) 6. Minat (interest) 	Ordinal
Pengendalian Internal (X₂)	Pengendalian Internal adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personal lain dalam organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait pencapaian tujuan (Rokhlinasari & Hidayat, 2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penaksiran Resiko 3. Aktivitas Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan 	Ordinal
Akuntabilitas Dana Desa (Y)	Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2019)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum 2. Akuntabilitas Proses 3. Akuntabilitas Program 4. Akuntabilitas Kebijakan 	Ordinal

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada Desa yang ada di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023.

Tabel 3.2
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2023																											
		Februai				Maret				April				Mei				Juni				Juli							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Penelitian Pendahuluan																												
2.	Pengajuan Judul																												
3.	Penyusunan Proposal																												
4.	Seminar Proposal																												
5.	Riset																												
6.	Pengolahan Data																												
7.	Sidang Skripsi																												

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2019)

Populasi dari penelitian ini adalah di seluruh perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa dan bendahara yang ada di Kecamatan Perbaungan yang berjumlah 24 desa.

Tabel 3.3
Jumlah Desa di Kecamatan Perbaungan

No	Nama Desa
1	Desa Bengkel
2	Desa Kesatuan
3	Desa Kota Galuh
4	Desa Lidah Tanah
5	Desa Lubuk Bayas
6	Desa Lubuk Cemara
7	Desa Lubuk Dendang
8	Desa Lubuk Rotan
9	Desa Melati II
10	Desa Pematang Sijonam
11	Desa Pematang Tatal
12	Desa Tanah Merah
13	Desa Tanjung Buluh
14	Desa Sei Nagalawan
15	Desa Sei Buluh
16	Desa Sei Sijenggi
17	Desa Sukajadi
18	Desa Suka Beras
19	Desa Jambur Pulau
20	Desa Citaman Jernih
21	Desa Adolina
22	Desa Deli Muda Hilir Desa
23	Desa Deli Muda Hulu
24	Desa Cinta Air

3.4.2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi secara keseluruhan.

Dengan demikian, sampel dapat dinyatakan sebagai bagian dari populasi yang diambil dengan teknik atau metode tertentu untuk diteliti dan digeneralisasi

terhadap populasi (Suryani & Hendrayani, 2015). Sampel dalam penelitian ini adalah semua desa yang ada di Kecamatan Perbaungan sebanyak 24 desa.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampling jenuh (total sampling). Sampling jenuh adalah sampel yang mewakili jumlah populasi. Biasanya dilakukan jika populasi kurang dari 100 (Suryani & Hendrayani, 2015)

Mengingat ada 72 orang (24 desa X 3 orang), maka layak untuk diambil keseluruhan untuk dijadikan sampel tanpa harus mengambil sampel dalam jumlah tertentu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Daftar Pertanyaan (*Quesioner*)

Teknik dan instrumen dalam penelitian yang digunakan adalah berupa kuesioner (angket/daftar pertanyaan). Kuesioner ini dibagikan kepada semua yang menjadi sampel penelitian yaitu Desa yang ada di Kecamatan Perbaungan.

Angket/kuesioner, yaitu pertanyaan/pernyataan yang disusun peneliti untuk mengetahui pendapat/persepsi responden peneliti tentang suatu variabel yang diteliti. Angket dalam penelitian ini ditujukan dimana setiap pernyataan mempunyai 5 opsi sebagai berikut:

Tabel 3.4
Skala Pengukuran

PERNYATAAN	BOBOT
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Skala pengukuran tersebut menggunakan skala ordinal, untuk mengukur orang tentang fenomena sosial.

Untuk menguji apakah instrument yang diukur cukup layak digunakan sehingga mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan pengukurannya maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas:

a. Uji Validitas

Menguji validitas berarti menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika instrumen valid/benar hasil pengukuranpun kemungkinan akan benar (Juliandi et al., 2018). Berikut rumus yang digunakan untuk uji validitas :

$$r = \frac{n(\sum x_i y_i) - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n \cdot \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n \cdot \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Sumber : (Sugiyono, 2019)

Dimana :

n = Banyaknya pasangan pengamatan

$\sum x$ = Jumlah pengamatan variabel x

$\sum y$ = Jumlah pengamatan variabel y

$(\sum x^2)$ = Jumlah kuadrat pengamatan variable x

$(\sum y^2)$ = Jumlah kuadrat pengamatan variable y

$\sum xy$ = Jumlah hasil kali variable x dan y

Tabel 3.5
Uji Validitas

Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Akuntabilitas Dana Desa	Y1	0.759	Valid
	Y2	0.785	Valid
	Y3	0.841	Valid
	Y4	0.729	Valid

Kompetensi Pemerintah Desa	X1.1	0.876	0.2319	Valid
	X1.2	0.849	0.2319	Valid
	X1.3	0.862	0.2319	Valid
	X1.4	0.863	0.2319	Valid
	X1.5	0.825	0.2319	Valid
	X1.6	0.848	0.2319	Valid
Sistem Pengendalian Internal	X2.1	0.622	0.2319	Valid
	X2.2	0.597	0.2319	Valid
	X2.3	0.731	0.2319	Valid
	X2.4	0.785	0.2319	Valid
	X2.5	0.674	0.2319	Valid

1. Nilai validitas untuk variabel Akuntabilitas Dana Desa lebih besar dari nilai r tabel yakni 0.2319 maka semua indikator pada variabel Akuntabilitas Dana Desa dinyatakan valid.
2. Nilai validitas Kompetensi Pemerintah Desa lebih besar dari nilai r tabel 0.2319 maka semua indikator pada variabel Kompetensi Pemerintah Desa dinyatakan valid.
3. Nilai validitas Sistem Pengendalian Internal lebih besar dari nilai r tabel 0.2319 maka semua indikator pada variabel Sistem Pengendalian Internal dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas merupakan bila terdapat kesamaan data waktu yang berbeda. Instrument yang reliable adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2019). Dalam menetapkan butir item pertanyaan dalam kategori reliable menurut (Juliandi et al., 2018). kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut

- a. Jika nilai koefisien reliabilitas *cronbach alpha* $> 0,6$, maka instrument dinyatakan reliable (terpercaya).
- b. Jika nilai koefisien reliabilitas *cronbach alpha* $< 0,6$, maka instrument dinyatakan tidak reliable (tidak terpercaya).

Tabel 3.6
Hasil Uji Realibilitas

No	Variabel	Nilai Alpha	Status
1	Akuntabilitas Dana Desa	0,782	Realibilitas Baik
2	Kompetensi Pemerintah Desa	0,926	Realibilitas Baik
3	Sistem Pengendalian Internal	0,709	Realibilitas Baik

1. Akuntabilitas Dana Desa memiliki nilai reliabilitas sebesar $0,782 > 0,600$ maka variabel Akuntabilitas Dana Desa adalah reliabel
2. Kompetensi Pemerintah Desa memiliki nilai reliabilitas sebesar $0,926 > 0,600$ maka variabel Kompetensi Pemerintah Desa adalah reliabel
3. Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai reliabilitas sebesar $0,709 > 0,600$ maka variabel Sistem Pengendalian Internal adalah reliabel.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

(Sugiyono 2019)

Dimana :

Y : Akuntabilitas Dana Desa

a : Nilai Konstanta Y bila $X_1, X_2, X_3 = 0$

X_1 : Kompetensi Pemerintah Desa

X_2 : Sistem Pengendalian Internal

Metode regresi merupakan model regresi yang menghasilkan estimator linier yang tidak biasa yang terbaik (best linier unbiased estimate). Kondisi ini akan terjadi jika dipenuhi beberapa asumsi yang disebut dengan uji asumsi klasik.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinieritas dan heterokedastisitas. Adapun masing-masing pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak (Juliandi et al., 2018). Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.

Kriteria pengambilan keputusan adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal regresi memenuhi asumsi normalitas.

b) Uji Multikolinieritas

Digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat diantara variabel independen. Apabila terdapat korelasi antara variabel bebas, maka terjadi multikolinearitas, demikian juga sebaliknya. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat VIF (*Variance Inflasi Factor*) antara variabel independen dan nilai *tolerance*. Batasan yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan $VIF > 10$.

c) Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas sebaliknya jika varian berbeda maka disebut heterokedastisitas. Ada tidaknya heterokedastisitas dapat diketahui dengan melalui grafik scatterplot antar nilai prediksi variabel independen dengan nilai residualnya. Dasar analisis yang dapat digunakan untuk menentukan heterokedastisitas adalah:

1. Jika pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heterokedastisitas.
2. Jika ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.6.3 Pengujian Hipotesis

Pada prinsipnya pengujian hipotesis ini merupakan untuk membuat keputusan sementara untuk melakukan penyanggahan dan pembenaran dari masalah yang akan ditelaah. Sebagai bahan untuk menetapkan kesimpulan tersebut kemudian ditetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Adapun pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Uji t (Uji Parsial)

Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel kepemimpinan dan variabel motivasi kerja terhadap variabel kinerja Pegawai digunakan uji t dengan rumus:

Jika nilai t dengan probabilitas korelasi yakni Sig-2 tailed < taraf signifikan (α) sebesar 0,05 maka H_0 diterima.

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Sumber : (Sugiyono 2019)

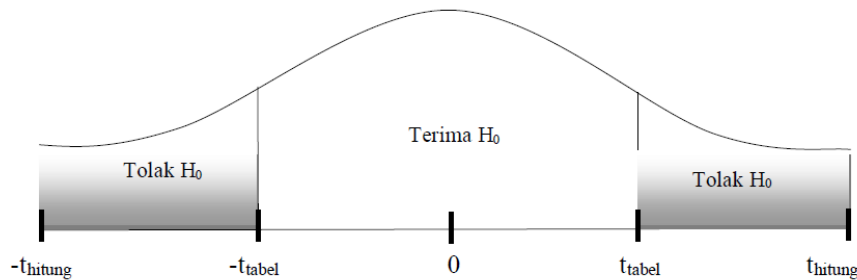
Dimana :

- t : nilai t hitung
 r : koefisien korelasi
 n : jumlah sampel

1. Jika nilai t dengan probabilitas korelasi yakni Sig-2 tailed < taraf signifikan (α) sebesar 0,05 maka H_0 diterima.
2. Sedangkan jika nilai t dengan probabilitas t dengan korelasi yakni Sig-2 tailed > taraf signifikan (α) sebesar 0,05 maka H_0 ditolak.

Hipotesis

1. $H_0 : r_s = 0$, artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).
2. $H_0 : r_s \neq 0$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).



Gambar 3.1 :Kriteria Pengujian Hipotesis t

b. Uji F (Uji Simultan)

Untuk mengetahui signifikan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat secara serempak digunakan uji F dengan rumus :

$$F_h = \frac{R^2/k}{(1 - R^2) - (n - k - 1)}$$

Sumber :(Sugiyono 2019 hal 257)

Dimana:

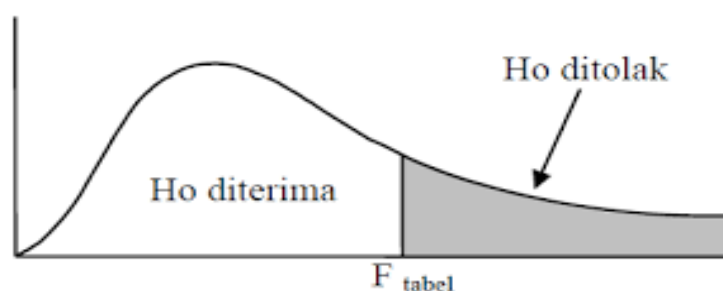
R^2 = Koefisien Korelasi Ganda

n = Jumlah Variabel

F = F_{hitung} yang selanjutnya dibandingkan dengan F_{tabel}

Ketentuan:

- Bila $f_{hitung} > f_{tabel}$ dan $-f_{hitung} < -f_{tabel}$, maka H_0 ditolak karena adanya korelasi yang signifikan antara variabel X_1 dan X_2 dengan Y .
- Bila $f_{hitung} \leq f_{tabel}$ dan $-f_{hitung} \geq -f_{tabel}$, maka H_0 diterima karena tidak adanya korelasi yang signifikan antara variabel X_1 dan X_2 terhadap Y .



Gambar 3.2 :Kriteria Pengujian Hipotesis F

3.6.4 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengatur seberapa jauh dalam menerangkan variasi variable dependen. Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variable dependen. Data dalam penelitian ini aka diolah dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS 24.0). hipotesis dalam penelitian ini dipengaruhi oleh nilai signifikan koefisien variabel yang bersangkutan setelah dilakukan pengujian.

$$D = R^2 \times 100\%$$

(Sugiyono, 2019)

Dimana:

- D : Koefisien determinasi
R : Nilai Korelasi Berganda
100 % : Persentase Kontribusi

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengola data angket dalam bentuk data yang terdiri dari 4 pernyataan untuk variabel Akuntabilitas Dana Desa (Y), 6 pernyataan untuk Kompetensi Pemerintah Desa (X1), dan 5 pernyataan untuk Sistem Pengendalian Internal (X2). Angket yang disebarkan ini diberikan kepada 72 orang responden Desa se Kecamatan Perbaungan sebagai sampel penelitian dengan menggunakan skala likert berbentuk tabel ceklis.

4.1.2 Identitas Responden

4.1.2.1. Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1.
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki Laki	60	83,33 %
2	Perempuan	12	16,67 %
TOTAL		72	100 %

Sumber : Data Diolah 2022

Dari tabel 4.1 diatas bisa dilihat bahwa persentase responden terdiri dari 60 (83,33 %) orang laki-laki dan perempuan sebanyak 12 (16,67%) orang. Bisa di Tarik kesimpulan bahwa yang menjadi mayoritas responden adalah laki-laki pada Desa se Kecamatan Perbaungan

4.1.2.2. Identitas Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.2.
Pendidikan Responden

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	SMA	40	55,56 %
2	D3	11	15,27 %
3	S1	21	29,17 %
4	S2	0	0 %
TOTAL		72	100 %

Sumber : Data Diolah 2022

Dari tabel 4.2 diatas bisa dilihat bahwa reponden terdiri dari pegawai yang tamatan SMA sebanyak 40 orang (55,55 %), tamatan D3 sebanyak 11 orang (15,27%), tamatan S1 sebanyak 21 orang (29,17%) dan tamatan S2 sebanyak 0 orang (0%). Dengan demikian yang menjadi mayoritas responden adalah yang tamatan SMA pada Desa se Kecamatan Perbaungan .

4.1.2.3. Identitas Berdasarkan Umur

Tabel 4.3
Umur Responden

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	18 - 30 Tahun	2	2,78 %
2	31 – 40 Tahun	11	15,27 %
3	41 – 50 Tahun	30	41,67 %
3	51 – 60 Tahun	29	40,28 %
TOTAL		72	100 %

Sumber : Data Diolah 2022

Dari tabel 4.3 diatas bisa dilihat bahwa reponden terdiri dari pegawai yang berumur 18-30 tahun sebanyak 2 orang (2,78 %), berumur 31 - 40 tahun sebanyak 11 orang (15,27 %), berumur 41-50 tahun yaitu sebanyak 30 orang (41,67 %).

berumur 51-60 tahun yaitu sebanyak 29 orang (40,28 %). Dengan demikian yang menjadi mayoritas responden adalah yang berumur rentang waktu 41 sampai 50 tahun pada Desa se Kecamatan Perbaungan

4.1.2.4. Identitas Berdasarkan Lama Bekerja

Tabel 4.4.
Lama Menjabat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	< 2 Tahun	3	4,17 %
2	3 – 5 Tahun	18	25 %
3	> 5 Tahun	51	70,83 %
TOTAL		72	100 %

Sumber : Data Diolah 2022

Dari tabel 4.4 diatas bisa dilihat bahwa reponden terdiri dari pegawai yang bekerja < 2 tahun sebanyak 3orang (4,17 %), bekerja 3 - 5tahun sebanyak 18 orang (25 %), bekerja > 5 tahun yaitu sebanyak 12 orang (70,83 %). Dengan demikian yang menjadi mayoritas responden adalah pegawai yang lama bekerja lebih dari 5 tahun pada Desa se Kecamatan Perbaungan .

4.1.3.Deskripsi Hasil Penelitian

4.1.3.1 Variabel Kompetensi Pemerintah Desa(X1)

Berdasarkan penyebaran angket kepada Desa se Kecamatan Perbaungan diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel Kompetensi Pemerintah Desa sebagai berikut :

Tabel 4.5.
Skor Angket Untuk Variabel Kompetensi Pemerintah Desa (X1)

Pert	SS		S		KS		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	43	59.72	18	25	7	9.72	2	2.78	2	2.78	72	100
2	43	59.72	18	25	8	11.11	0	0.00	3	4.17	72	100
3	46	63.89	15	20.83	7	9.72	1	1.39	3	4.17	72	100
4	29	40.28	25	34.72	16	22.22	0	0.00	2	2.78	72	100
5	30	41.67	26	36.11	14	19.44	0	0.00	2	2.78	72	100
6	26	36.11	26	36.11	17	23.61	1	1.39	2	2.78	72	100

Data Penelitian Diolah (2023)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Kompetensi Pemerintah Desa adalah:

1. Jawaban responden Saya memahami Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 43 orang (59,72%).
2. Jawaban responden Saya memahami tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagai penyusun laporan keuangan, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 43 orang (59,72%).
3. Jawaban responden Saya sebagai aparat desa melakukan pembukuan mendasar pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 46 orang (63,89%)
4. Jawaban responden Saya sering mengikuti pelatihan teknis untuk meningkatkan kemampuan menyusun laporan keuangan, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 29 orang(40,28%).
5. Jawaban responden Saya sebagai aparat desa mempunyai inisiatif untuk mengerjakan pekerjaan yang ada, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 30 orang (41,67%)

6. Jawaban responden Saya selalu bekerja dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang pegawai, mayoritas responden menjawab sangat setuju dan setuju sebanyak 26 orang (36,11%)

Berdasarkan pertanyaan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perangkat desa yang ada di Kecamatan Perbauangan sangat setuju dengan penerapan kompetensi pemerintah desa. Dengan terlihat bahwa perangkat desa mengetahui Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan, Memahami tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagai penyusun laporan keuangan, melakukan pembukuan mendasar pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sering mengikuti pelatihan teknis untuk meningkatkan kemampuan menyusun laporan keuangan, mempunyai inisiatif untuk mengerjakan pekerjaan yang ada dan selalu bekerja dengan mengedepankan etika dan kode etik.

4.1.3.3 Variabel Sistem Pengendalian Internal (X2)

Berdasarkan penyebaran angket kepada Desa se Kecamatan Perbauangan diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel Sistem Pengendalian Internal sebagai berikut :

Tabel 4.6

Skor Angket Untuk Variabel Sistem Pengendalian Internal (X2)

Pert	SS		S		KS		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	36	50	22	30.56	14	19.44	0	0	0	0	72	100
2	33	45.83	25	34.72	12	16.67	1	1.389	1	1.39	72	100
3	31	43.06	27	37.5	12	16.67	2	2.778	0	0	72	100
4	33	45.83	22	30.56	16	22.22	1	1.389	0	0	72	100
5	25	34.72	28	38.89	14	19.44	4	5.556	1	1.39	72	100

Data Penelitian Diolah (2023)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Sistem Pengendalian Internal adalah:

1. Jawaban responden Struktur perangkat desa di tempat saya bekerja mampu berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 36 orang (50%).
2. Jawaban responden Saya selalu melakukan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan desa diberikan untuk meningkatkan kompetensi agar terhindar dari segala bentuk resiko yang mungkin terjadi, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 33 orang (45,83%).
3. Jawaban responden Saya sering melakukan pemeriksaan dana desa dilakukan dengan independen atas kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan dana desa, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 31 orang (43,06%).
4. Jawaban responden Saya selalu memberikan informasi mengenai keuangan desa yang ada dipublikasikan dan diidentifikasi dengan baik dan apat dikomunikasikan dengan pihak yang membutuhkan, termasuk masyarakat, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 33 orang (45,83%).
5. Jawaban responden Saya sering melakukan pemantuan maupun pengawasan dana desa dilakukan secara periodik agar dapat meminimalisir tindakan atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, mayoritas responden menjawab setuju dan sangat setuju sebanyak 25 orang (34.72%).

Berdasarkan pertanyaan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perangkat desa yang ada di Kecamatan Perbauangan sangat setuju dengan penerapan Sistem Pengendalian Internal. Dengan terlihat bahwa perangkat desa menerapkan Struktur perangkat desa mampu berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, selalu melakukan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan desa diberikan untuk meningkatkan kompetensi agar terhindar dari segala bentuk

resiko yang mungkin terjadi, sering melakukan pemeriksaan dana desa dilakukan dengan independen atas kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan dana desa, selalu memberikan informasi mengenai keuangan desa yang ada dipublikasikan dan diidentifikasi dengan baik dan apat dikomunikasikan dengan pihak yang membutuhkan, termasuk masyarakat dan sering melakukan pemantuan maupun pengawasan dana desa dilakukan secara periodik agar dapat meminimalisir tindakan atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

4.1.3.1 Variabel Akuntabilitas Dana Desa (Y)

Berdasarkan penyebaran angket kepada Desa se Kecamatan Perbaungan diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel Akuntabilitas Dana Desa sebagai berikut :

Tabel 4.7
Skor Angket Untuk Variabel Akuntabilitas Dana Desa (Y)

Pert	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	51	70.83	12	16.67	5	6.94	1	1.39	3	4.17	72	100
2	44	61.11	17	23.61	8	11.11	0	0.00	3	4.17	72	100
3	32	44.44	25	34.72	13	18.06	0	0.00	2	2.78	72	100
4	27	37.50	30	41.67	12	16.67	1	1.39	2	2.78	72	100

Data Penelitian Diolah (2023)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Akuntabilitas Dana Desa adalah:

1. Jawaban responden Semua penerimaan dan pengeluaran desa kami dilaksanakan melalui rekening kas desa dan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 51 orang (70,83%).
2. Jawaban responden Laporan keuangan yang kami sajikan telah memuat dan

mengungkapkan informasi yang cukup memadai, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 44 orang (61,11%)

3. Jawaban responden Penyusunan laporan pertanggungjawaban memuat realisasi pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan desa secara lengkap, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 32 orang (44,44%)
4. Jawaban responden Informasi anggaran dana desa bisa diakses atau dilihat diwebsite desa, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 27 orang(37,50%).

Berdasarkan pertanyaan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perangkat desa yang ada di Kecamatan Perbauangan sangat setuju dengan penerapan Akuntabilitas Dana Desa. Dengan terlihat bahwa perangkat desa menerapkan Semua penerimaan dan pengeluaran desa kami dilaksanakan melalui rekening kas desa dan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, Laporan keuangan yang disajikan telah memuat dan mengungkapkan informasi yang cukup memadai, penyusunan laporan pertanggungjawaban memuat realisasi pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan desa secara lengkap dan Informasi anggaran dana desa bisa diakses atau dilihat diwebsite desa.

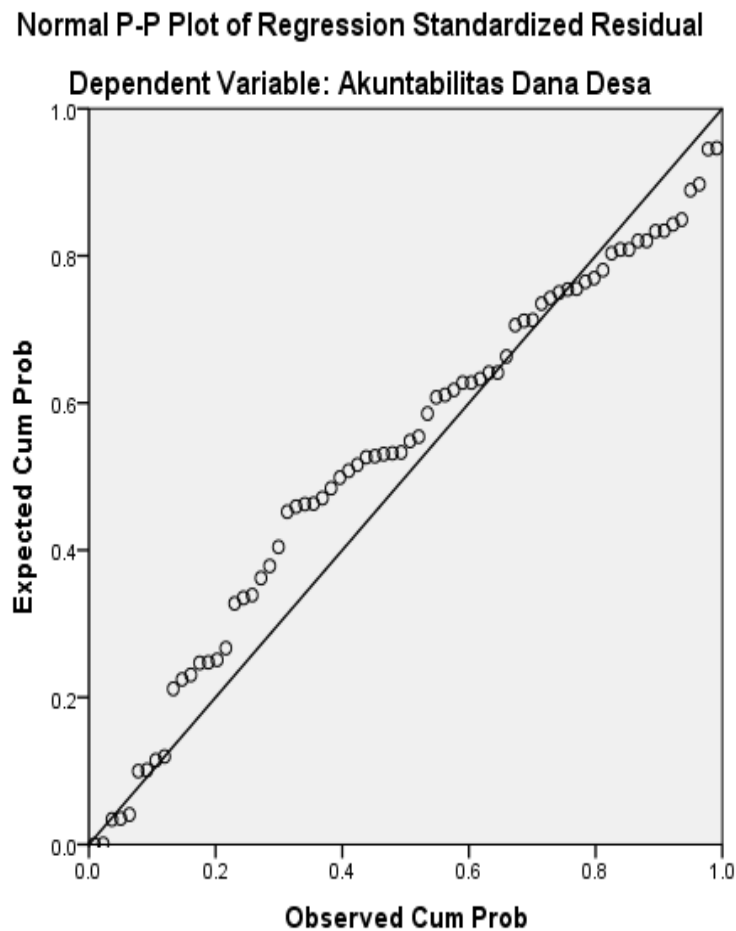
4.1.4 Uji Asumsi

4.1.4.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. (Juliandi et al., 2018). Data yang berdistribusi normal tersebut dapat dilihat melalui grafik p-plot. Menurut Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Kriteria pengujiannya adalah :

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas

Gambar. 4.1 Uji Normalitas P Plot



Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 24

Berdasarkan dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal. Uji normalitas ini yang dilakukan dengan menggunakan p-plot diatas, dapat dinyatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan sudah memenuhi asumsi normalitas.

4.1.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas ini digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antara variable independent. Cara yang digunakan untuk menilai adalah melihat factor inflasi varian (VIF/ variance inflasi factor), yang tidak melebihi 4 atau 5 (Juliandi et al., 2018).

Cara yang digunakan untuk menilainya adalah dengan melihat nilai Faktor Inflasi Varian (VIF) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bila $VIF > 10$, maka terdapat multikolinieritas.
2. Bila $VIF < 10$, berarti tidak dapat multikolinieritas.
3. Bila $Tolerance > 0,1$, maka tidak terjadi multikolinieritas.
4. Bila $Tolerance < 0,1$, maka terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kompetensi Pemerintah Desa	.856	1.169
	Pengendalian Internal	.856	1.169

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Dana Desa

Sumber : Data di olah SPSS 24

Berdasarkan dari tabel diatas, hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai VIF dan nilai Tolerance untuk masing-masing variable adalah sebagai berikut :

1. Nilai tolerance Kompetensi Pemerintah Desasebesar $0,856 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $1,169 < 10$, maka variable Kompetensi Pemerintah Desadinyatakan bebas dari multikolinieritas.

2. Nilai tolerance Sistem Pengendalian Internal sebesar $0,856 > 0,10$ dan nilai VIF $1,169 < 10$, maka variabel Sistem Pengendalian Internal dinyatakan bebas dari multikolinieritas.

4.1.4.3. Uji Heterokedastisitas

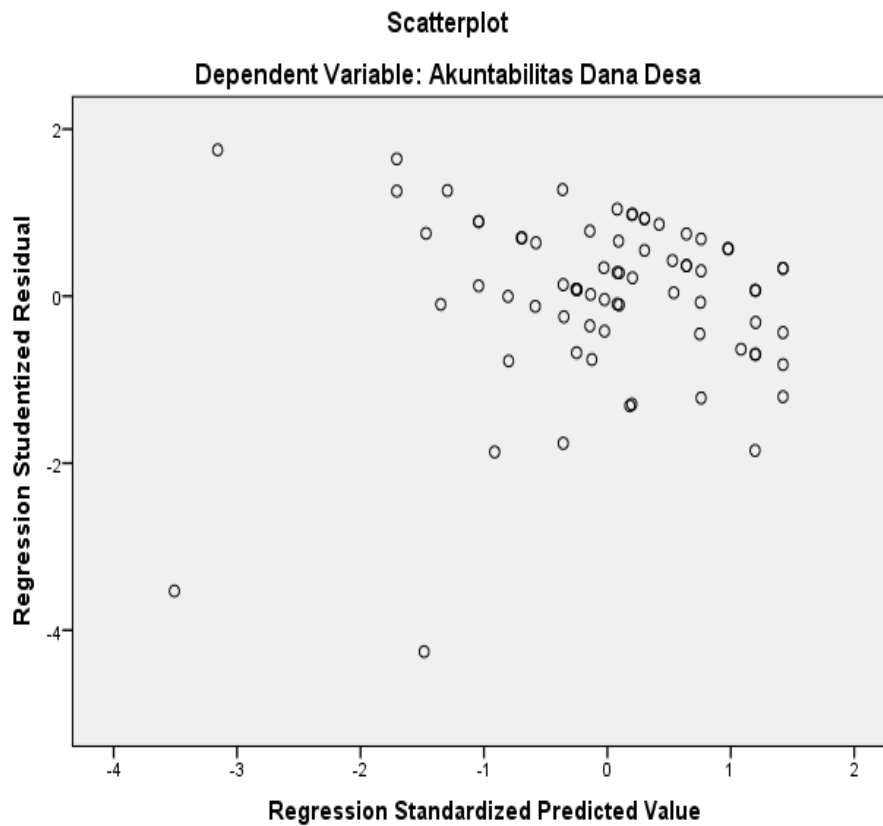
Uji Heteroskedasitas ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians residual dari suatu pengamatan yang lain. Jika varians residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedasitas, dan jika varians berbeda disebut heterokedasitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heterokedasitas.

Deteksi heterokedasitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan menggunakan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SPRESID (nilai residualnya) (Juliandi et al., 2018).

Dasar kriteria dalam uji heterokedasitas ini adalah sebagai berikut :

1. Jika ada pola tertentu, titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi heterokedasitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedasitas.

Gambar. 4.2
Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan gambar 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa penyebaran residual adalah tidak teratur dan tidak membentuk pola. Hal tersebut dapat dilihat pada titik-titik atau plot yang menyebar. Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.1.4.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode ke t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi.

Tabel 4.9
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.471 ^a	.222	.200	2.66221	1.621
a. Predictors: (Constant), Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa					
b. Dependent Variable: Akuntabilitas Dana Desa					

Sumber : Data di olah SPSS 24

Berdasarkan dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai durbin watson (D-W) sebesar 1.621 diantara -2 sampai +2 ($-2 < 1.621 < + 2$). Maka dapat disimpulkan bahwa dari angka durbin watson (D-W) tersebut tidak terjadi autokorelasi.

4.1.5. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi bertujuan untuk memprediksi nilai suatu variable terikat akibat pengaruh dari variable bebas (Juliandi et al., 2014). Berikut ini adalah hasil pengolahan data regresi linier berganda :

Tabel 4.10
Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.615	2.440		2.711	.008
	Kompetensi Pemerintah Desa	.159	.069	.264	2.297	.025
	Pengendalian Internal	.310	.118	.303	2.639	.010
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Dana Desa						

Sumber : Data di olah SPSS 24

Dari tabel diatas diketahui nilai regresi linear bergandanya sebagai berikut

1. Konstanta = 6,615

2. Kompetensi Pemerintah Desa = 0,159
3. Sistem Pengendalian Internal = 0,310

Hasil tersebut dimasukkan kedalam persamaan regresi linier berganda sehingga diketahui persamaan berikut :

$$Y = 6,615 + 0,159 X_1 + 0,310 X_2$$

Dimana keterangannya adalah :

1. Konstanta sebesar 6,615 dengan arah hubungan positif menunjukkan bahwa apabila nilai variabel independen dianggap konstan yaitu Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal dan lingkungan kerja maka nilai Akuntabilitas Dana Desa akan meningkat sebesar 6,615.
2. Kompetensi Pemerintah Desa sebesar 0,159 dengan arah pengaruh positif menunjukkan bahwa apabila Kompetensi Pemerintah Desa mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh kenaikan Akuntabilitas Dana Desa sebesar 0,159 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
3. Sistem Pengendalian Internal sebesar 0,310 dengan arah pengaruh positif menunjukkan bahwa apabila Sistem Pengendalian Internal mengalami peningkatan maka akan diikuti oleh peningkatan Akuntabilitas Dana Desa sebesar 0,310 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

4.1.6. Pengujian Hipotesis

4.1.6.1. Uji Signifikan Parsial (Uji -t)

Uji t yang digunakan dalam analisis ini digunakan untuk menilai kapasitas masing-masing variable independen. (Sugiyono, 2019) Penjelasan lain dari uji t adalah untuk menguji apakah variabel independen (X) memiliki hubungan yang signifikan atau tidak signifikan, baik sebagian maupun independen, terhadap variable dependen (Y) dengan tingkat signifikansi dalam penelitian ini menggunakan alpha 5% atau 0,05.

Adapun metode dalam penentuan t_{table} menggunakan ketentuan tingkat signifikan 5% dengan

$$df=n-k ,$$

$$df= 72-3 = 69$$

$$t_{table} = 1,99495$$

Dasar pengambilan keputusan uji t (parsial) adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} .
 - a. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, hipotesis diterima maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat (maka tolak H_0).
 - b. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, hipotesis ditolak maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (maka terima H_0).
2. Berdasarkan nilai signifikan
 - a. Jika nilai sig. $< 0,05$ maka variabel bebas signifikan terhadap variabel terikat (maka tolak H_0).
 - b. Jika nilai sig. $> 0,05$ maka variabel bebas tidak signifikan terhadap variabel terikat (maka terima H_0).

Adapun hasil pengujian yang diperoleh dapat dilihat dari tabel 4.10 :

1. Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Kompetensi Pemerintah Desa berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap Akuntabilitas Dana Desa dimana $t_{hitung} = 2,297$ dan $t_{tabel} = 1,99495$. Didalam hal ini $t_{hitung} 2,297 > t_{tabel} 1,99495$ Ini berarti H_0 ditolak berarti Kompetensi Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Dana Desa .

Selanjutnya terlihat pula nilai sig adalah 0,025 sedang taraf signifikan α yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka nilai sig $0,025 < 0,05$, sehingga H_a di tolak, ini berarti antara Kompetensi Pemerintah Desa berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Dana Desa pada Desa se Kecamatan Perbaungan.

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap Akuntabilitas Dana Desa dimana $t_{hitung} = 2.639$ dan $t_{tabel} = 1,99495$. Didalam hal ini $t_{hitung} 2.639 > t_{tabel} 1,99495$ Ini berarti H_0 ditolak berarti antara Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Dana Desa .

Selanjutnya terlihat pula nilai sig adalah 0,010 sedang taraf signifikan α yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka nilai sig $0,010 < 0,05$, sehingga H_a

di tolak, ini berarti antara Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Dana Desa pada Desa se Kecamatan Perbaungan.

4.1.6.2. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F atau juga disebut uji signifikan serentak dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas yaitu insentif dan motivasi untuk dapat atau menjelaskan tingkah laku atau keragaman variabel terikat yaitu produktivitas kerja. Uji F juga dimaksud untuk mengetahui apakah semua variabel memiliki koefisien regresi sama dengan nol. (Sugiyono, 2019).

Dasar pengambilan keputusan uji F (Simultan) adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan nilai f hitung dan f tabel
 - a. Jika nilai f hitung $>$ f tabel, hipotesis diterima maka variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat (maka tolak H_0).
 - b. Jika nilai f hitung $<$ f tabel hipotesis ditolak maka variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (maka terima H_0).
2. Berdasarkan nilai signifikan
 - a. Jika nilai sig. $<$ 0,05 maka variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
 - b. Jika nilai sig. $>$ 0,05 maka variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat

Tabel 4.11
Uji Secara Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	139.583	2	69.792	9.847	.000 ^b
	Residual	489.028	69	7.087		
	Total	628.611	71			
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Dana Desa						
b. Predictors: (Constant), Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa						

Sumber : Data di olah SPSS 24

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa nilai F adalah 9,847, kemudian nilai sig nya adalah 0,000. Taraf signifikan yang digunakan adalah 5%, uji dua pihak dan $df=n-k$ dan $k-1$

Bedasarkan tabel 4.13 diatas diperoleh F_{hitung} untuk variabel sebesar 16.847 untuk kesalahan 5%.

$$F_{tabel} = n-k = 72-3 = 69 \text{ dan } k-1 = 3-1=2$$

$$F_{tabel} 3,13$$

Didalam hal ini $F_{hitung} 9,847 > F_{tabel} 3,13$ dengan nilai sig adalah 0,000 sedang taraf signifikan α yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka nilai sig $0,000 < 0,05$,. Ini berarti H_a dan H_o di tolak

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Kompetensi Pemerintah Desa dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Dana Desa pada Desa se Kecamatan Perbaungan .

4.1.7. Koefisien Determinansi (R-Square)

Nilai R-Square dari koefisien determinasi digunakan untuk melihat bagaimana variasi nilai suatu variable terikat dipengaruhi oleh variasi nilai suatu variable bebas. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Apabila nilai

kolerasi sebesar -1 atau 1 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sempurna antara kedua variable, sedangkan nilai koefisien korelasi 0 menunjukkan hubungan antara kedua variable sama sekali tidak sempurna (Sugiyono, 2019).

Berikut adalah hasil pengujian statistiknya :

Tabel 4.13
Uji Koefisien Determinasi (R)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.471 ^a	.222	.200	2.66221	1.621
a. Predictors: (Constant), Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa					
b. Dependent Variable: Akuntabilitas Dana Desa					

Sumber : Data di olah SPSS 24

Semakin tinggi nilai R-square maka akan semakin baik bagi model regresi, karena berarti kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikatnya juga semakin besar. nilai R-square 0,222 menunjukkan 22,2 % variabel Akuntabilitas Dana Desa dipengaruhi Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal dan lingkungan kerja sisanya 68,8 % dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.3 Pembahasan

4.3.1. Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Hasil Uji hipotesis Kompetensi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Dana Desa melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh dimana $t_{hitung} 2,297 > t_{tabel} 1,99495$ dan nilai sig $0,025 < 0,05$, sehingga H_0 di tolak, ini berarti antara Kompetensi Pemerintah Desa berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Dana Desa pada Desa se Kecamatan Perbaungan.

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai menjadi penyangga utama dan sangat berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Organisasi harus berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia. Seperti pelatihan dan pengembangan yang dapat membuat sumber daya manusia dapat melaksanakan pekerjaan mereka saat ini secara efektif dan mempersiapkan pekerjaan di masa mendatang. Apabila kompetensi sumber daya manusia pemerintah desa meningkat maka akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa (Rifandi, 2019).

Hasil penelitian ini mendukung teori *stewardship*. Teori *stewardship* menekankan pada dua hal penting yakni kewajiban agen (pemerintah) menjalankan amanah yang diberikan principal (masyarakat) dengan penuh tanggung jawab. Untuk mencapai sasaran dan tujuan strategis dibutuhkan individu atau sumber daya manusia yang kompeten, handal dan visioner.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nurdin & Wijaya, 2019), (Indraswari & Rahayu, 2021) dan (Puspa & Prasetyo, 2020) menyatakan bahwa kompetensi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa

4.2.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Hasil uji hipotesis Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Dana Desa melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh dimana ini $t_{hitung} 2.639 > t_{tabel} 1,99495$ dan nilai sig $0,010 < 0,05$, sehingga H_0 di tolak, ini

berarti antara Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Dana Desa pada Desa se Kecamatan Perbaungan .

Pentingnya sistem pengendalian intren pemerintah terhadap akuntabilitas dimana sistem pengendalian intern merupakan faktor yang penting dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa, berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2008 dimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan untuk memberi keyakinan yang memadai tentang ; kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan.

Pengendalian intern yang dilakukan di Desa merupakan proses integral dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus pimpinan dan seluruh aparat pemerintah desa untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jika pengendalian intern tidak berfungsi dengan baik, tentunya akan mengakibatkan terjadinya penyimpangan dan kebocoran dalam laporan keuangan, sehingga menjadikan laporan keuangan belum memenuhi karakteristik atau nilai informasi yang handal

Hasil peneltian yang dilakukan oleh (Mualifu et al., 2019), (Widyatama et al., 2017), (Atiningsih, 2019) dan (Maharani & Akbar, 2020) menyebutkan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa.

4.2.4. Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Hasil Uji Hipotesis secara simultan antara Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal dan lingkungan kerja terhadap Akuntabilitas Dana Desa melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh $9,847 > F_{\text{tabel}} 2,81$ dan nilai sig $0,000 < 0,05$. Ini berarti H_a dan H_o di tolak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Kompetensi Pemerintah Desa dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Dana Desa pada Desa se Kecamatan Perbaungan.

Laporan pertanggungjawaban adalah bentuk akuntabilitas pemerintahan desa kepada pemangku kepentingan Selain pemerintah pusat, masyarakat juga memerlukan laporan keuangan untuk mengetahui sejauhmana realisasi anggaran dan pelaksanaannya. Sehingga dapat dilihat bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik menunjukkan sistem pemerintahan yang baik pula.(Sadjiarto, 2020)

Penerapan Faktor Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terbagi 3 tahap yakni Accountability Infrastructure, tahapan dimana struktur untuk mendukung sistem akuntansi disuatu organisasi harus kuat. Accounting Practice, tahapan dimana sistem akuntansi harus bekerja seperti seharusnya. Dan Accounting Culture, tahapan yang berkaitan dengan budaya yang terjadi disuatu organisasi. (Widyatama et al., 2017)

Kompetensi yang dimiliki kepala desa dan bendahara desa berdampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sesuai dengan teori stewardship dimana sifat manusia dapat dipercaya, mampu bertindak dengan

penuh tanggung jawab Pada pemerintahan desa pejabat pemerintah desa merupakan eksekutif yang melaksanakan pemerintahan desa dan penanggung jawab. Rendahnya kompetensi aparatur desa dapat menjadi penghalang akuntabilitas pengelolaan dana. Apabila kompetensi sumber daya manusia desa bermasalah ditambah lagi fungsi monitoring dan evaluasi atas pengelolaan dana desa kurang efektif dapat mengakibatkan penggunaan dana desa tidak sesuai dengan alokasi peruntukannya.

Dengan diimplementasikannya sistem pengendalian internal, organisasi akan melakukan kegiatan yang efektif dan efisien, memiliki keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan aset yang memadai sehingga organisasi akan mempunyai keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi. Evaluasi dan perbaikan pengendalian internal melalui pengawasan inspektorat ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas

Dan hasil nilai R-square 0,222 menunjukkan 22,2 % variabel Akuntabilitas Dana Desa dipengaruhi Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal dan lingkungan kerja sisanya 68,8 % dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti kualitas laporan keuangan, pengawasan internal, penerapan akuntansi sektor publik dll

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Secara parsial Kompetensi Pemerintah Desa berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Dana Desa pada Desa Se Kecamatan Perbaungan.
2. Secara parsial Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Dana Desa pada Desa Se Kecamatan Perbaungan.
3. Secara simultan Kompetensi Pemerintah Desa dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Dana Desa pada Desa Se Kecamatan Perbaungan .

5.2. Saran

Berdasarkan fenomena sebelumnya dan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran adalah sebagai berikut :

1. Desa Se Kecamatan Perbaungan agar lebih memperhatikan kondisi dalam pengelolaan keuangan desa agar tepat sasaran.
2. Keterbatasan sampel yang digunakan maka penelitian selanjutnya dapat mencari tempat riset dengan sampel responden yang lebih banyak.
3. Penelitian selanjutnya, sebaiknya menambah variabel yang lain pada Akuntabilitas Dana Desa seperti kualitas laporan keuangan, pengawasan internal, penerapan akuntansi sektor publik dll

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyaruddin, M., & Ramadanis, R. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 110–118.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1), 67–82.
- Astuty, W. (2016). Peran Auditor Internal dan Pengendalian Intern dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 1(1), 1–36.
- Atiningsih, S. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 14–25.
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344.
- Butler, D. C., Glen Jr, W. B., Schandl, C., & Phillips, A. (2020). Glycogen Storage Disease Type IV Diagnosed At Fetal Autopsy. *Pediatric and Developmental Pathology*, 23(4), 301–305.
- Cheng, J. H., She, H., Han, Y.-P., Wang, J., Xiong, S., Asahina, K., & Tsukamoto, H. (2008). Wnt Antagonism Inhibits Hepatic Stellate Cell Activation And Liver Fibrosis. *American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology*, 294(1), G39–G49.
- Dessler, G. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 14. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Devi, S., Antong, A., & Bachri, S. (2020). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara). *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1–15.
- Diana, S., & Haryati, T. (2021). Peran Audit Internal Dan Pengendalian Internal Dalam Upaya Mencegah Dan Mendeteksi Fraud. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN)*, 1(1), 442–456.
- Elder, R. J., Beasley, M. S., Arens, A. A., & Jusuf, A. A. (2021). *Jasa Audit dan Assurance*. Salemba Empat.
- Habiburrahman, H., & Zhavira, F. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*,

11(2), 109–119.

Harnanto, H. (2017). *Akuntansi Biaya : Konsep dan Metodologi Penggolongan Biaya Elemen Biaya Produksi Perhitungan Harga Pokok Produksi*. BPFY Yogyakarta.

Hermawan, R. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Duta Media Publishing.

Hery. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Grasindo.

Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4), 1–15.

Juliandi, A., Irfan, I., & Manurung, S. (2018). *Mengolah Data Penelitian Bisnis Dengan SPSS*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.

Lubis, A., Sari, E. N., & Astuty, W. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa serta Dampak Terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(2), 107–126.

Maharani, D. N., & Akbar, F. S. (2020). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. *Behavioral Accounting Journal*, 3(1), 1–20.

Manik, L. F., Sari, E. N., & Irfan, I. (2022). Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas Terhadap Penyusunan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada SMA Swasta Bagian Medan Utara. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 8(2), 19–29.

Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.

Moenek, R., & Suwanda, D. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT Remaja Rosdakarya.

Mualifu, M., Guspul, A., & Hermawan, H. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemernitah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(1), 49–59.

Mulyadi. (2014). *Auditing (Edisi Keen)*. Salemba Empat.

Nababan, N., & Sembiring, M. (2021). *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Dana Desa Pada Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara*. UMSU.

- Nurdin, Y., & Wijaya, I. (2019). Pengaruh Kompetensi Akuntansi Aparat Pengelola Dana Desa Dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai). *Accounting, Accountability, and Organization System (AAOS) Journal*, 1(1), 85–95.
- Oktavia, A., Bustami, E., & Megawati, M. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add)(Studi Kasus Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Tanah Kampung). *JURNAL ADMINISTRASI NUSANTARA MAHA*, 3(11), 118–132.
- Polutua, A., Mattoasi, M., & Usman, U. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal & Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 66–78.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298.
- Rifa'i, M., Jubertus, J., & Susanti, R. A. D. (2021). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Pajak, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 919–928.
- Rifandi, Z. W. (2019). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 4(1), 1–17.
- Rokhlinasari, S., & Hidayat, A. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Bank Bjb Syariah Cirebon. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Ban BJB Syariah Cirebon*, 8(2), 491–508.
- Sadjiarto, A. (2020). Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 2(2), 135–150.
- Saragih, F. (2017). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Good Government Governance Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Skpd Se Kota Medan. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 1(8), 1–34.
- Sari, E. N. (2014). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 12(2).

- Sari, M., & Viranda, J. A. (2021). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Program Pembangunan Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Intervening Pada Kantor Desa Kecamatan Beringin*. UMSU.
- Sedarmayanti, S. (2018). *Tata Kerja dan Produktivitas Kerja*. CV Mandar Maju.
- Sugiyono, S. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharti, S., & Rumsari, E. T. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Terhadap Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Desa. *COMPETITIVE*, 16(2), 95–104.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Biaya: Teori dan Penerapannya Seluk Beluk Akuntansi*. Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, & Wiratna, V. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Pustaka Baru Press.
- Suparyadi, S. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. ANDI.
- Suryani, S., & Hendryadi, H. (2015). *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Prenadamedia Grup.
- Sutrisno, E. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pranada Media Group.
- Utami, S., & Rambe, I. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa-Desa Di Kecamatan Percut Sei Tuan. UMSU.
- Wibowo, W. (2020). *Manajemen Kinerja*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20.

KUESIONER PENELITIAN SKRIPSI
PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS
DANA DESA (STUDI KASUS PEMERINTAH DESA DI
KECAMATAN PERBAUNGAN)

Kepada Yth. Bapak / Ibu
Perangkat Desa di Desa Se-Kecamatan Perbaungan
Di Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat

Ijinkan perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ananda Fakhri (1905170073) mahasiswa Program Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bersama ini saya memohon kesediaannya untuk mengisi daftar kuesioner yang diberikan. Informasi yang diberikan sebagai data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi pada Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ini saya memohon untuk kesediaan Bapak/ Ibu dalam membantu saya mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah, oleh karena itu jawaban atau pendapat yang Bapak/Ibu berikan sangat bermanfaat bagi pengembang ilmu. Saya menyadari permohonan ini sedikit mengganggu kegiatan Bapak/Ibu dalam kuesioner ini tidak ada hubungannya dengan status atau kedudukan dalam instansi, maka jawaban yang benar adalah jawaban yang menggambarkan keadaan Bapak/Ibu. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini dalam waktu singkat.

Hormat Saya

Muhammad Rizky Ananda Fakhri

A. Petunjuk Pengisian

1. Jawablah pernyataan ini sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu
2. Pilihlah jawaban dari tabel daftar pernyataan dengan memberi **tanda checklist** (√) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu.

Adapun makna tanda jawaban tersebut sebagai berikut:

- | | | |
|--------|-----------------------|-----------------|
| a. SS | : Sangat Setuju | : dengan Skor 5 |
| b. S | : Setuju | : dengan Skor 4 |
| c. KS | : Kurang Setuju | : dengan Skor 3 |
| d. TS | : Tidak Setuju | : dengan Skor 2 |
| e. STS | : Sangat Tidak Setuju | : dengan Skor 1 |

B. Identitas Responden

No. Responden :

Umur : (Tahun)

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Pendidikan Terakhir : SMA/SMK D3 S1 S2 S3

Lama Menjabat : < 2 Tahun 3-5 tahun > 6 Tahun

1. Kompetensi Pemerintah Desa (X1)

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
Pengetahuan (knowledge)						
1	Saya memahami Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan					
Pemahaman (<i>Understanding</i>)						
2	Saya memahami tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagai penyusun laporan keuangan					
Kemampuan/Keterampilan (<i>Skill</i>)						
3	Saya sebagai aparat desa melakukan pembukuan mendasar pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)					
Nilai (<i>Value</i>)						
4	Saya sering mengikuti pelatihan teknis untuk meningkatkan kemampuan menyusun laporan keuangan					
Sikap (<i>Attitude</i>)						
5	Saya sebagai aparat desa mempunyai inisiatif untuk mengerjakan pekerjaan yang ada					
Minat (<i>Interest</i>)						
6	Saya selalu bekerja dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang pegawai					

2. Pengendalian Internal (X2)

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
Lingkungan Pengendalian						
1	Struktur perangkat desa di tempat saya bekerja mampu berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan					
Penaksiran Resiko						
2	Saya selalu melakukan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan desa					

	diberikan untuk meningkatkan kompetensi agar terhindar dari segala bentuk resiko yang mungkin terjadi					
Aktivitas Pengendalian						
3	Saya sering melakukan pemeriksaan dana desa dilakukan dengan independen atas kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan dana desa					
Informasi dan Komunikasi						
4	Saya selalu memberikan informasi mengenai keuangan desa yang ada dipublikasikan dan diidentifikasi dengan baik dan apat dikomunikasikan dengan pihak yang membutuhkan, termasuk masyarakat					
Pemantauan						
5	Saya sering melakukan pemantauan maupun pengawasan dana desa dilakukan secara periodik agar dapat meminimalisir tindakan atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi					

3. Akuntabilitas Dana Desa (Y)

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum						
1	Semua penerimaan dan pengeluaran desa kami dilaksanakan melalui rekening kas desa dan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah					
Akuntabilitas Proses						
2	Laporan keuangan yang kami sajikan					

	telah memuat dan mengungkapkan informasi yang cukup memadai					
Akuntabilitas Program						
3	Penyusunan laporan pertanggungjawaban memuat realisasi pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan desa secara lengkap					
Akuntabilitas Kebijakan						
4	Informasi anggaran dana desa bisa diakses atau dilihat diwebsite desa					

LAMPIRAN LAMPIRAN

No	Kode	Akuntabilitas Dana Desa				Total	Rata Rata
		Y1	Y2	Y3	Y4		
1	A01	5	5	5	5	20	5.00
2	A02	5	5	5	2	17	4.25
3	A03	5	5	5	4	19	4.75
4	A04	5	4	5	5	19	4.75
5	A05	2	5	4	4	15	3.75
6	A06	4	5	3	3	15	3.75
7	A07	5	5	4	5	19	4.75
8	A08	3	5	4	5	17	4.25
9	A09	4	5	4	4	17	4.25
10	A10	4	5	3	5	17	4.25
11	A11	3	5	5	5	18	4.50
12	A12	1	1	4	5	11	2.75
13	A13	4	5	4	3	16	4.00
14	A14	4	5	3	5	17	4.25
15	A15	4	4	5	5	18	4.50
16	A16	3	5	3	4	15	3.75
17	A17	5	5	5	3	18	4.50
18	A18	5	5	5	4	19	4.75
19	A19	5	5	5	5	20	5.00
20	A20	5	5	5	5	20	5.00
21	A21	5	4	4	4	17	4.25
22	A22	5	5	5	5	20	5.00
23	A23	5	4	5	4	18	4.50
24	A24	5	5	5	5	20	5.00
25	A25	5	5	5	5	20	5.00
26	A26	5	3	5	4	17	4.25
27	A27	4	5	5	5	19	4.75
28	A28	5	5	4	4	18	4.50
29	A29	4	4	4	4	16	4.00
30	A30	5	5	5	3	18	4.50
31	A31	5	3	3	3	14	3.50
32	A32	5	5	4	4	18	4.50
33	A33	5	4	4	4	17	4.25
34	A34	5	4	3	4	16	4.00
35	A35	5	4	4	4	17	4.25
36	A36	5	4	4	4	17	4.25
37	A37	4	4	4	4	16	4.00

38	A38	5	4	4	4	17	4.25
39	A39	5	3	3	3	14	3.50
40	A40	3	5	3	4	15	3.75
41	A41	4	4	4	4	16	4.00
42	A42	5	5	5	5	20	5.00
43	A43	5	5	5	3	18	4.50
44	A44	5	5	4	4	18	4.50
45	A45	5	5	5	5	20	5.00
46	A46	5	5	3	5	18	4.50
47	A47	5	4	4	4	17	4.25
48	A48	5	5	3	3	16	4.00
49	A49	5	5	4	4	18	4.50
50	A50	5	4	5	5	19	4.75
51	A51	5	4	4	4	17	4.25
52	A52	5	3	3	3	14	3.50
53	A53	5	3	5	5	18	4.50
54	A54	5	5	5	4	19	4.75
55	A55	5	5	5	4	19	4.75
56	A56	5	4	4	4	17	4.25
57	A57	5	5	5	5	20	5.00
58	A58	5	5	5	5	20	5.00
59	A59	5	5	4	5	19	4.75
60	A60	5	5	5	5	20	5.00
61	A61	4	5	4	4	17	4.25
62	A62	5	5	5	4	19	4.75
63	A63	5	5	5	3	18	4.50
64	A64	5	5	4	4	18	4.50
65	A65	1	1	1	1	4	1.00
66	A66	3	3	3	3	12	3.00
67	A67	5	3	3	3	14	3.50
68	A68	5	5	5	5	20	5.00
69	A69	5	5	5	5	20	5.00
70	A70	5	3	5	5	18	4.50
71	A71	4	4	4	4	16	4.00
72	A72	1	1	1	1	4	1.00
TOTAL		323	315	301	295	1234	308.50
RATA RATA		4.49	4.38	4.18	4.10	17.14	4.28

No	Kode	Kompetensi Pemerintah Desa						Total	Rata Rata
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6		
1	A01	4	4	4	4	4	4	24	4.00
2	A02	5	5	5	3	5	3	26	4.33
3	A03	5	5	5	5	4	3	27	4.50
4	A04	5	5	4	5	5	3	27	4.50
5	A05	5	5	5	5	5	5	30	5.00
6	A06	5	5	5	3	3	4	25	4.17
7	A07	5	5	5	5	3	5	28	4.67
8	A08	5	5	5	3	4	5	27	4.50
9	A09	5	5	5	5	3	3	26	4.33
10	A10	3	5	5	3	4	3	23	3.83
11	A11	4	3	4	4	4	4	23	3.83
12	A12	4	4	5	4	4	4	25	4.17
13	A13	4	5	5	5	4	5	28	4.67
14	A14	2	4	5	5	4	4	24	4.00
15	A15	4	4	5	4	4	4	25	4.17
16	A16	4	4	5	4	5	5	27	4.50
17	A17	4	4	5	4	4	4	25	4.17
18	A18	5	5	5	5	5	5	30	5.00
19	A19	4	5	4	5	5	4	27	4.50
20	A20	5	5	5	4	5	3	27	4.50
21	A21	5	3	5	5	5	5	28	4.67
22	A22	5	5	5	5	5	5	30	5.00
23	A23	5	5	5	5	5	5	30	5.00
24	A24	5	5	5	4	4	4	27	4.50
25	A25	5	5	4	5	5	5	29	4.83
26	A26	5	5	5	5	5	5	30	5.00
27	A27	5	5	5	3	3	3	24	4.00
28	A28	5	5	5	5	5	5	30	5.00
29	A29	5	5	5	3	3	3	24	4.00
30	A30	5	5	4	4	4	4	26	4.33
31	A31	5	5	5	4	4	4	27	4.50
32	A32	5	5	5	5	5	4	29	4.83
33	A33	5	4	5	4	4	4	26	4.33
34	A34	5	5	5	4	4	4	27	4.50
35	A35	4	5	4	4	4	4	25	4.17
36	A36	5	5	5	4	4	4	27	4.50
37	A37	5	5	5	3	3	3	24	4.00
38	A38	5	5	5	3	3	3	24	4.00
39	A39	5	4	5	4	4	4	26	4.33

40	A40	5	5	5	5	5	5	30	5.00
41	A41	5	5	5	5	5	5	30	5.00
42	A42	5	5	5	5	5	5	30	5.00
43	A43	5	5	5	5	3	5	28	4.67
44	A44	5	5	5	5	5	5	30	5.00
45	A45	4	4	4	4	4	4	24	4.00
46	A46	3	3	3	3	3	3	18	3.00
47	A47	2	1	1	3	3	3	13	2.17
48	A48	4	4	4	4	4	4	24	4.00
49	A49	4	4	4	4	4	4	24	4.00
50	A50	3	3	3	3	3	3	18	3.00
51	A51	5	5	5	5	5	5	30	5.00
52	A52	5	5	4	4	5	5	28	4.67
53	A53	5	5	5	5	5	5	30	5.00
54	A54	4	4	4	4	4	4	24	4.00
55	A55	5	5	5	5	5	5	30	5.00
56	A56	5	4	3	5	5	5	27	4.50
57	A57	5	4	5	4	5	5	28	4.67
58	A58	5	5	5	5	5	5	30	5.00
59	A59	4	5	5	5	5	4	28	4.67
60	A60	5	5	5	5	5	5	30	5.00
61	A61	5	5	5	5	5	5	30	5.00
62	A62	4	5	4	4	5	4	26	4.33
63	A63	3	3	3	3	3	3	18	3.00
64	A64	3	4	2	3	4	2	18	3.00
65	A65	3	3	3	3	3	3	18	3.00
66	A66	5	3	5	4	5	4	26	4.33
67	A67	4	4	3	3	4	3	21	3.50
68	A68	4	4	4	4	4	4	24	4.00
69	A69	4	4	4	4	4	4	24	4.00
70	A70	1	1	1	1	1	1	6	1.00
71	A71	3	3	3	3	3	3	18	3.00
72	A72	1	1	1	1	1	1	6	1.00
TOTAL		314	314	316	295	298	289	1826	304.33
RATA RATA		4.36	4.36	4.39	4.10	4.14	4.01	25.36	4.23

No	Kode	Pengendalian Internal					Total	Rata Rata
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5		
1	A01	3	5	5	5	2	20	4.00
2	A02	5	5	5	5	4	24	4.80
3	A03	5	5	5	5	3	23	4.60
4	A04	5	5	4	5	4	23	4.60
5	A05	4	5	2	3	4	18	3.60
6	A06	4	4	5	5	2	20	4.00
7	A07	4	4	5	4	3	20	4.00
8	A08	4	4	4	3	5	20	4.00
9	A09	5	5	3	4	2	19	3.80
10	A10	4	4	5	4	4	21	4.20
11	A11	5	3	4	3	4	19	3.80
12	A12	4	4	4	4	1	17	3.40
13	A13	5	4	3	3	3	18	3.60
14	A14	4	3	5	5	5	22	4.40
15	A15	3	5	4	3	3	18	3.60
16	A16	4	3	2	2	3	14	2.80
17	A17	5	4	3	5	4	21	4.20
18	A18	5	5	5	5	4	24	4.80
19	A19	5	3	5	5	5	23	4.60
20	A20	3	5	4	5	4	21	4.20
21	A21	5	5	5	5	5	25	5.00
22	A22	5	4	5	4	4	22	4.40
23	A23	5	3	5	3	5	21	4.20
24	A24	4	5	5	5	3	22	4.40
25	A25	5	4	3	4	4	20	4.00
26	A26	5	5	4	5	5	24	4.80
27	A27	3	3	5	5	5	21	4.20
28	A28	5	5	3	3	3	19	3.80
29	A29	3	3	5	5	5	21	4.20
30	A30	4	5	3	3	3	18	3.60
31	A31	4	4	5	4	4	21	4.20
32	A32	4	4	4	4	4	20	4.00
33	A33	4	4	4	4	4	20	4.00
34	A34	4	4	4	4	4	20	4.00
35	A35	4	4	4	4	4	20	4.00
36	A36	3	4	4	4	4	19	3.80
37	A37	3	3	4	4	4	18	3.60
38	A38	3	3	3	3	3	15	3.00
39	A39	4	4	3	3	3	17	3.40

40	A40	5	5	4	4	4	22	4.40
41	A41	5	5	5	5	5	25	5.00
42	A42	5	5	5	5	5	25	5.00
43	A43	5	5	4	5	4	23	4.60
44	A44	5	5	5	5	5	25	5.00
45	A45	5	4	5	4	5	23	4.60
46	A46	3	3	4	3	4	17	3.40
47	A47	3	1	3	3	3	13	2.60
48	A48	4	4	4	4	3	19	3.80
49	A49	4	4	4	5	5	22	4.40
50	A50	3	2	4	4	4	17	3.40
51	A51	5	5	3	3	3	19	3.80
52	A52	5	5	5	5	5	25	5.00
53	A53	5	5	5	4	5	24	4.80
54	A54	4	4	5	5	5	23	4.60
55	A55	5	5	4	4	4	22	4.40
56	A56	5	5	5	5	5	25	5.00
57	A57	5	5	4	5	5	24	4.80
58	A58	5	5	5	5	5	25	5.00
59	A59	5	5	5	5	5	25	5.00
60	A60	5	5	4	5	4	23	4.60
61	A61	5	5	5	5	5	25	5.00
62	A62	5	4	5	5	4	23	4.60
63	A63	3	3	4	5	5	20	4.00
64	A64	5	4	4	3	4	20	4.00
65	A65	3	3	4	4	4	18	3.60
66	A66	5	5	3	3	3	19	3.80
67	A67	4	5	5	5	5	24	4.80
68	A68	5	5	4	4	4	22	4.40
69	A69	4	4	5	5	5	23	4.60
70	A70	5	5	5	5	5	25	5.00
71	A71	4	4	4	4	4	20	4.00
72	A72	3	4	3	3	2	15	3.00
TOTAL		310	304	303	303	288	1508	301.60
RATA RATA		4.31	4.22	4.21	4.21	4.00	20.94	4.19



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238**

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Muhammad Rizky Ananda Fakhri
NPM : 1905170073
Dosen Pembimbing : Dr. Widia Astuty, SE, M.Si, Ak, CA, CPA, QIA
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Studi Kasus Pemerintah Desa di Kecamatan Perbaungan)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Konkritisasi judul - lengkapi fenomena penelitian	14/2-2023	
Bab 2	- lengkapi data pendukung - kerangka konseptual & dikembangkan	15/4-2023	
Bab 3	- perbaiki definisi operasional variabel - Teknik analisis data & perbaikan	5/5-2023	
Daftar Pustaka	Tambahkan literatur pendukung yang relevan	12/5-2023	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Lengkapi kuisioner penelitian		
Persetujuan Seminar Proposal	Selesai bimbingan proposal	19/5-2023	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si)

Medan, 19 Mei 2023
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Dr. Widia Astuty, SE, M.Si, Ak, CA, CPA, QIA)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/20/12/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 20/12/2022

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Rizky Ananda Fakhri
NPM : 1905170073
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Banyak fenomena yang terjadi apakah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP (standar akuntansi Pemerintah) dan menghasilkan informasi yang diharapkan dengan melihat opini seorang auditor . Terdapat perubahan pola fikir aparat pengawasan interal sebagai peringatan dini terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi kolusi, korupsi dan nepotisme. Kesalahan atau penyimpangan tugas oleh orang- orang terkait yang akan mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan.

Rencana Judul : 1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah
2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah
3. Pengaruh pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi keuangan pemerintah (studi empiris satuan perangkat dinas provinsi sumatera utara)

Objek/Lokasi Penelitian : Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Dinas kabupaten Serdang Bedagai, DPRD Kabupaten Serdang Bedagai

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon



(Muhammad Rizky Ananda Fakhri)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/20/12/2022

Nama Mahasiswa : Muhammad Rizky Ananda Fakhri
NPM : 1905170073
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Pengajuan Judul : 20/12/2022
Nama Dosen pembimbing*) : Dr. Widia Astuty, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., QIA (27 Desember 2022)

Judul Disetujui**)

.....
: Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa
Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap
Akuntabilitas Dana Desa (Studi Kasus
Pemerintah Desa di Kecamatan Perbaungan).....

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zulia Hanum, S.E, M.Si.)

Medan, 19 Februari - 2023.....

Dosen Pembimbing

(Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA., QIA)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

***) Diisi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, Kamis - 09 - Maret - 2023

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fakultas Ekonomi
Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara



Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : M U H A M M A D R I Z K Y A N A N D A F A K H R I

NPM : 1 9 0 5 1 7 0 0 7 3

Tempat/Tgl Lahir : P E M A T A N G G U N T U N G
2 A G U S T U S 2 0 0 0

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasiswa : D U S U N I D E S A S U K A J A D I K E C.
P E R B A U N G A N K A B. S E R D A N G B E D A G A

Tempat Penelitian: B A K E S B A N G P O L S E R D A N G
B E D A G A

Alamat Penelitian : J L N E G A R A N O . 3 0 0 , F I R D A U S , K E C . S E I R A M P A H ,
K A B . S E R D A N G B E D A G A , S U M A T E R A U T A R A 2 0 9 9 5

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Ketua jurusan / Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum ..S.E., M.Si)

Wassalam
Pemohon

(Muhammad Rizky Ananda Fakhri)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 737/II.3-AU/UMSU-05/F/2023
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 17 Sya'ban 1444 H
09 Maret 2023 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Serdang Bedagai
Jln. Negara No.300, Firdaus, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Muhammad Rizky Ananda Fakhri
Npm : 1905170073
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Studi Kasus Pemerintah Desa Di Kecamatan Perbaungan)

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Pertinggal



Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si

NIDN : 0109086502





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 734/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 14 Februari 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Muhammad Rizky Ananda Fakhri
N P M : 1905170073
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Studi Kasus Pemerintah Desa Di Kecamatan Perbaungan)

Dosen Pembimbing : **Dr. Widia Astuty, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., QIA**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 09 Maret 2024**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 17 Sya'ban 1444 H
09 Maret 2023 M



Dekan

Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502



Tembusan :

1. Pertinggal





MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtart Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Senin, 19 Juni 2023* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Muhammad Rizky Ananda Fakhri*
NPM. : 1905170073
Tempat / Tgl.Lahir : Pematang Guntung, 2 Agustus 2000
Alamat Rumah : Jln. Raya Sukajadi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
Judul Proposal : Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Studi Kasus Pemerintah Desa Di Kecamatan Perbaungan)

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	<i> tambah rint gap pada latar belakang</i>
Bab II	<i> perbaiki cara penyusunan skema buku panduan</i>
Bab III
Lainnya
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, *19 Juni 2023*

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. Widia Astuty, SE., M.Si., Ak., CA., CPA.,
QIA

Pemanding

Sukma Lesmana, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Senin, 19 Juni 2023* menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Rizky Ananda Fakhri
NPM : 1905170073
Tempat / Tgl.Lahir : Pematang Guntung, 2 Agustus 2000
Alamat Rumah : Jln. Raya Sukajadi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
Judul Proposal : Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Studi Kasus Pemerintah Desa Di Kecamatan Perbaungan)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Dr. Widia Astuty, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., QIA*

Medan, 19 Juni 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. Widia Astuty, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., QIA

Pembanding

Sukma Lesmana, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si
NIDN : 0105087601



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KECAMATAN PERBAUNGAN

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 3 Perbaungan
Kode Pos. 20986

Perbaungan, 05 Juni 2023

Nomor : 18.39/070/151/2023
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth :
Kepala Desa se- Kecamatan
Perbaungan
di
tempat

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 18.36/070/223/III/2023 tanggal 14 Maret 2013 perihal izin penelitian, bahwasanya yang bernama dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD RIZKY ANANDA FAKHRI
NPM : 1905170073
Program Studi : Akutansi
Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Studi Kasus Pemerintahan Desa di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)
Lokasi Penelitian : Desa se- Kecamatan Perbaungan
Penanggung Jawab : Dekan Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si

Akan melaksanakan penelitian sekaligus pengambilan data di Desa yang Bapak/Ibu pimpin. Untuk itu diminta kepada Saudara/i kiranya dapat membantu sesuai dengan keperluan.

Selanjutnya disampaikan kepada mahasiswa diatas agar :

1. Memenuhi peraturan / ketentuan yang berlaku dan menjaga ketertiban di lokasi penelitian.
2. Selambai - lambainya 3 (tiga) bulan setelah penelitian berakhir diwajibkan menyampaikan 1 (satu) eksemplar hasil penelitian ke Kantor Camat Perbaungan.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

An.CAMAT PERBAUNGAN
KASIKESOS





PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Negara Nomor 300 Sei Rampah, Sumatera Utara Kode Pos 20695
Telp. (0621) 41009 Fax. (0621) 441962

SURAT KETERANGAN

Nomor : 18.36/070 / 223 / III / 2023

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

Memperhatikan : Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tanggal 09
Maret 2023, Nomor : 737/II.3-AU/UMSU-05/F/2023, Perihal : Izin
Riset Pendahuluan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serdang Bedagai memberikan
Surat Keterangan kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
untuk melakukan kegiatan penelitian kepada :

Nama : MUHAMMAD RIZKY ANANDA FAKHRI
Alamat : Dusun I Desa Sukajadi Kec. Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai
NPM : 1905170073
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa dan Sistem
Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa
(Studi Kasus Pemerintah Desa di Kecamatan Perbaungan)
Lokasi Penelitian : Kantor Camat Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
Penanggung Jawab : Dekan Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan tidak disalahgunakan untuk tertentu yang dapat mengganggu
kestabilan pemerintahan serta mematuhi peraturan/ ketentuan yang berlaku dan
menjaga ketertiban lokasi Penelitian.
2. Surat Keterangan ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila Penelitian
tidak sesuai dengan surat permohonan beserta data dan berkasnya.
3. Setelah melakukan Penelitian, yang bersangkutan segera menyerahkan hasil
Penelitian 1 (satu) eksemplar kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.
Serdang Bedagai selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah Penelitian berakhir.
4. Surat Keterangan ini berlaku Pada Tanggal 14 Maret s/d 14 Juni 2023.
5. Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Sei Rampah, 14 Maret 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



M. KAHAR EFENDI. S.Sos

PEMERINTAH KAB. I

NIP. 19650930 198603 1 005

Tembusan :

1. Bapak Bupati Serdang Bedagai (sebagai laporan).
2. Pertinggal.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[f umsumedan](#)

[@ umsumedan](#)

[# umsumedan](#)

[# umsumedan](#)

Nomor : 1980/IL.3-AU/UMSU-05/F/2023
Lamp. : -
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 17 Muharam 1445 H
04 Agustus 2023 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Kantor Kecamatan Perbaungan
Jln. Perintis Kemerdekaan No.3, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Muhammad Rizky Ananda Fakhri
N P M : 1905170073
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Studi Kasus Pemerintah Desa Di Kecamatan Perbaungan)

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Pertinggal



Dekan

Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si

NIDN : 0109086502





PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KECAMATAN PERBAUNGAN

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 3 Perbaungan
Kode Pos. 20986

SURAT KETERANGAN

Nomor : 18.39/070/ 224 /2023

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 1980/IL.3-AU/UMSU-05/F/2023 Tanggal 04 Agustus 2023 tentang Menyelesaikan Riset, dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : MUHAMMAD RIZKY ANANDA FAKHRI
NPM : 1905170073
Program Studi : Akutansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Studi Kasus Pemerintahan Desa di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)

Telah selesai melaksanakan riset / penelitian di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Perbaungan
Pada tanggal : 04 Agustus 2023

An.CAMAT PERBAUNGAN
KASIKESOS


ANI SYAHWENY, SH
PENATA TK. I
NIP. 19780920 200604 2 012

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Muhammad Rizky Ananda Fakhri
Tempat/Tanggal Lahir : Pematang Guntung, 2 Agustus 2000
NPM : 1905170073
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 1 (Satu) dari 2 (Dua) Bersaudara
Alamat : Desa Sukajadi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai
No. Telepon : 085830977735
E-Mail : muhammadrizkyanandaf12@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah : Pahriadi S.Pd.I
Nama Ibu : Nurlinda
Pekerjaan Ayah : PNS
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Sukajadi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2007 – 2013 : SD Negeri 105361 Lubuk Cemara Kec. Perbaungan
2. Tahun 2013 – 2016 : Mts Alwashliyah 16 Perbaungan
3. Tahun 2016 – 2019 : MAS Alwashliyah 12 Perbaungan
4. Tahun 2019 – Sekarang : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Agustus 2023

Muhammad Rizky Ananda Fakhri
NPM 1905170073